

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK,
DAN BUKTI POTONG E-BUPOT, DALAM KEMUDAHAN
PELAPORAN PAJAK, DI DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KAB. JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Retno Ayu Wulandari
NIM: 211105030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK,
DAN BUKTI POTONG E-BUPOT, DALAM KEMUDAHAN
PELAPORAN PAJAK, DI DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KAB. JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Oleh:

Retno Ayu Wulandari
NIM: 211105030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**



**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK,
DAN BUKTI POTONG E-BUPOT, DALAM KEMUDAHAN
PELAPORAN PAJAK, DI DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KAB. JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

Retno Ayu Wulandari
NIM: 211105030001

Disetujui pembimbing

Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M
NIP: 199112052023211022

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK,
DAN BUKTI POTONG E-BUPOT, DALAM KEMUDAHAN
PELAPORAN PAJAK, DI DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KAB. JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 25

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun
NIP. 197506052011011002


Fatimatuazzahro, S.H.I., M.SEL.
NIP. 199508262020122007

Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.

()

2. Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196808072000031001



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui."(Q.S. Al-Anfal (8:27))¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

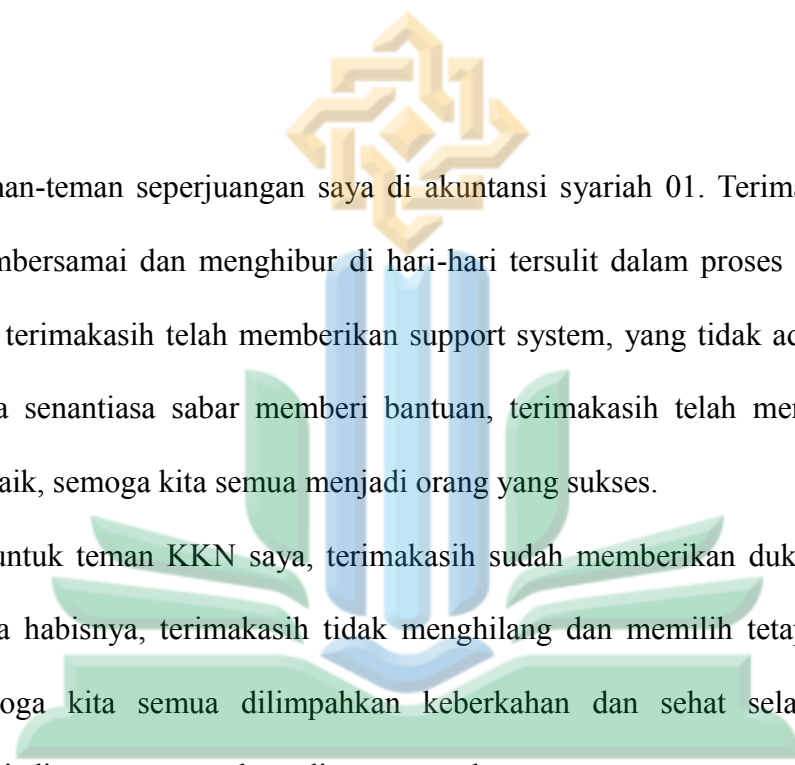
¹ Al-Quran Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Quran , 2015



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan Rahmat dan HidayahNya saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini saya tujukan kepada beberapa orang yang sangat berperan penting dalam lancarnya skripsi ini:

1. Teristimewa kedua orang tua saya, Imam Suja'i dan pintu surgaku ibu Yuliani, gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga, serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya. Terimakasih atas segala pengorbanan yang tulus dan kasih yang diberikan. Beliau memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik. Semoga Rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan ayah ibu, sehat selalu, barokah panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Teruntuk bungsu di keluarga saya yaitu adik saya M. Bintang Nur Alamsyah yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang, meskipun sering kali berselisih akan tetapi dia tidak pernah tahan berlama-lama, terimakasih sudah terlahir sebagai adik penulis karena dialah yang menjadikan penulis untuk menjadi lebih semangat.
3. Kepada kakek dan nenek saya, dan seluruh anggota keluarga terimakasih do'a dan semua yang telah diberikan, semoga allah membalas semua kebaikan kalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan barokah umur.

- 
4. Teman-teman seperjuangan saya di akuntansi syariah 01. Terimakasih telah kebersamai dan menghibur di hari-hari tersulit dalam proses skripsi saya dan terimakasih telah memberikan support system, yang tidak ada habisnya, serta senantiasa sabar memberi bantuan, terimakasih telah menjadi teman terbaik, semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
 5. Teruntuk teman KKN saya, terimakasih sudah memberikan dukungan yang tiada habisnya, terimakasih tidak menghilang dan memilih tetap berteman, semoga kita semua dilimpahkan keberkahan dan sehat selalu, semoga menjadi orang yang sukses di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Retno Ayu Wulandari, Mohammad Mirza Pratama, 2025: Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik dan Bukti Potong E-Bupot dalam Kemudahan Pelaporan Pajak di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember

Kata kunci: Sistem Elektronik, E-Bupot, Pelaporan Pajak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengadopsi sistem digital dalam administrasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi e-Bupot (bukti potong elektronik), yang memungkinkan proses pembuatan dan pelaporan SPT Masa dilakukan secara elektronik melalui platform DJP Online. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan metode manual yang selama ini digunakan, yang cenderung memakan waktu, rawan kesalahan, dan memiliki risiko kehilangan data.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi sistem elektronik dan e-Bupot di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember? 2) Apakah e-Bupot lebih efektif dibandingkan sistem manual sebelumnya? dan 3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapannya?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis implementasi sistem elektronik dan e-Bupot dalam pelaporan pajak; 2) Menilai efektivitas sistem tersebut dibandingkan dengan metode manual; serta 3) Mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi dalam optimalisasi pelaksanaan sistem.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot memberikan dampak positif terhadap proses pelaporan pajak, terutama dalam hal efisiensi waktu, keakuratan data, dan pengurangan pekerjaan manual. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan literasi digital dan minimnya pelatihan teknis kepada pegawai. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kelembagaan berupa peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan teknis secara berkelanjutan agar implementasi e-Bupot dapat berjalan optimal di lingkungan instansi pemerintah daerah.



KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik dan Bukti Potong E-Bupot dalam Kemudahan Pelaporan Pajak di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna dan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

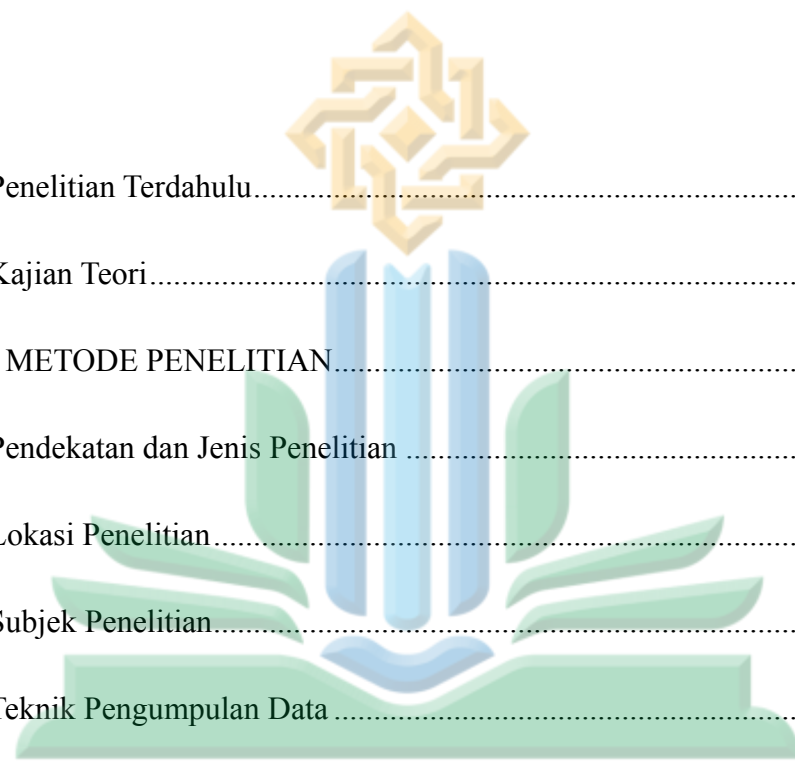
1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- 
5. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen Penasihat Akademik saya dari tahun 2023 hingga sekarang.
7. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E.,M.Ak selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya selama proses penulisan skripsi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Bapak Ir. Rahman Anda, ST, MT,M. Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jember.
11. Seluruh Petugas dan Staf yang ada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jember.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAIAN PUSTAKA.....	14



A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	37
F. Teknik Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	46
Gambar 4.2 Tampilan Login	52
Gambar 4.3 Pra Pelaporan Spt	52
Gambar 4.4 Tampilan Menu Pra-Pelaporan	53
Gambar 4.5 Tampilan Menu Pph	53
Gambar 4.6 Pengisian Dokumen.....	54
Gambar 4.7 Tampilan Menu Ppn	54
Gambar 4.8 Pengisian Npwp Dan No.Faktur.....	55
Gambar 4.9 Pelaporan Pajak Secara Manual	58



DAFTAR LAMPIRAN

Matrik penelitian	74
Pernyataan Keaslian Tulisan	75
Pedoman wawancara	76
Dokumentasi	77
Surat Lulus Plagiasi	79
Surat Izin Penelitian	80
Surat Selesai Penelitian.....	81
Keterangan Selesai Bimbingan	82
Jurnal Kegiatan Penelitian	83
Biodata Penulis	84



BAB 1

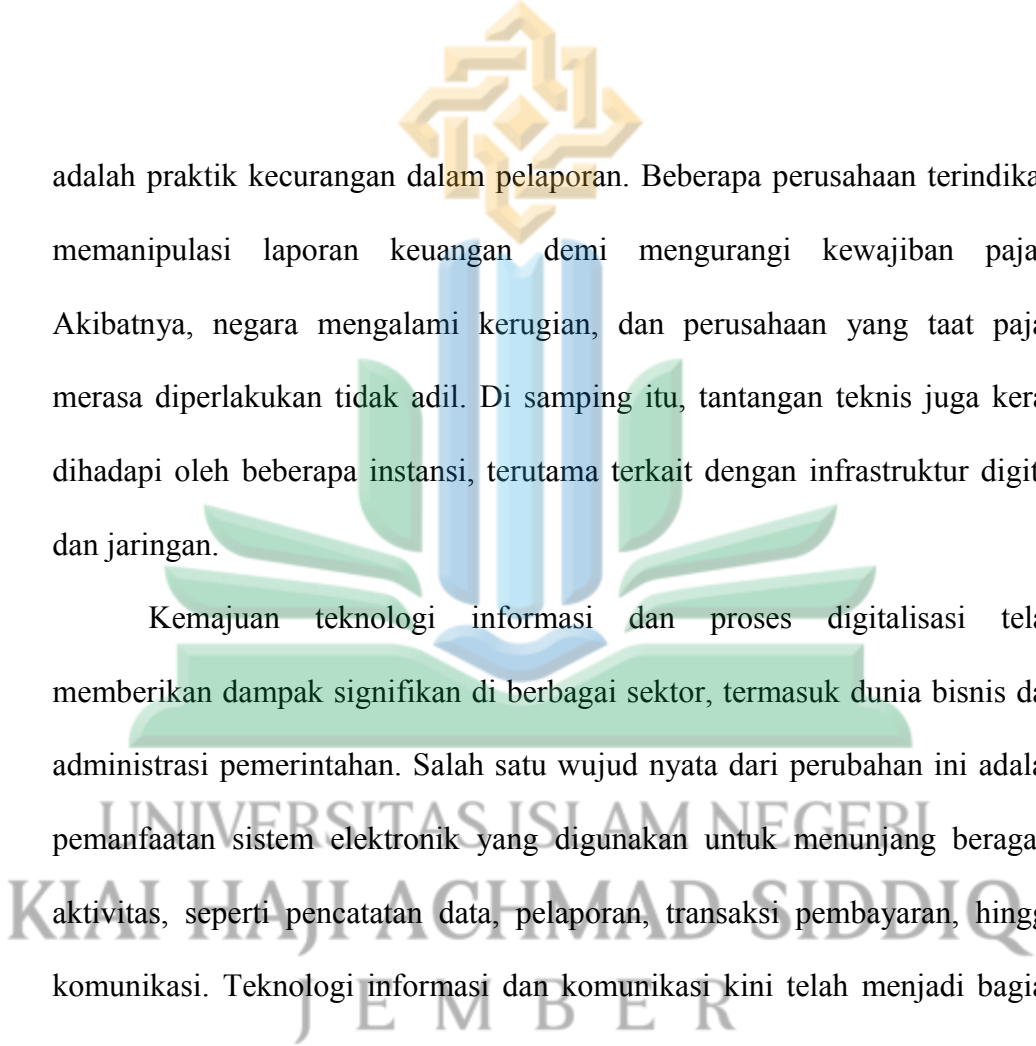
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih baik. Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan dan penyediaan layanan publik yang memadai demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan berbagai program pembangunan nasional, pembiayaan menjadi hal yang sangat penting karena membutuhkan dana dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan negara yang ada agar pembangunan dapat terus berjalan dengan lancar. Pajak memainkan peran penting dalam mengembangkan bangsa. Pajak berperan sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan negara serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.² Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Kepatuhan perpajakan menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah seperti menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak.³ Namun, proses pelaporan pajak tidak selalu berjalan lancar. Salah satu masalah yang sering terjadi

² N Azizah et al., "Penggunaan Sistem Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Sebagai Bentuk Kemudahan Pelaporan Pajak Pada Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi," *ADM: Jurnal Abdi ...*, 2024, 67–70, <https://ejournal.lapad.id/index.php/adm/article/view/534%0Ahttps://ejournal.lapad.id/index.php/adm/article/download/534/374>.

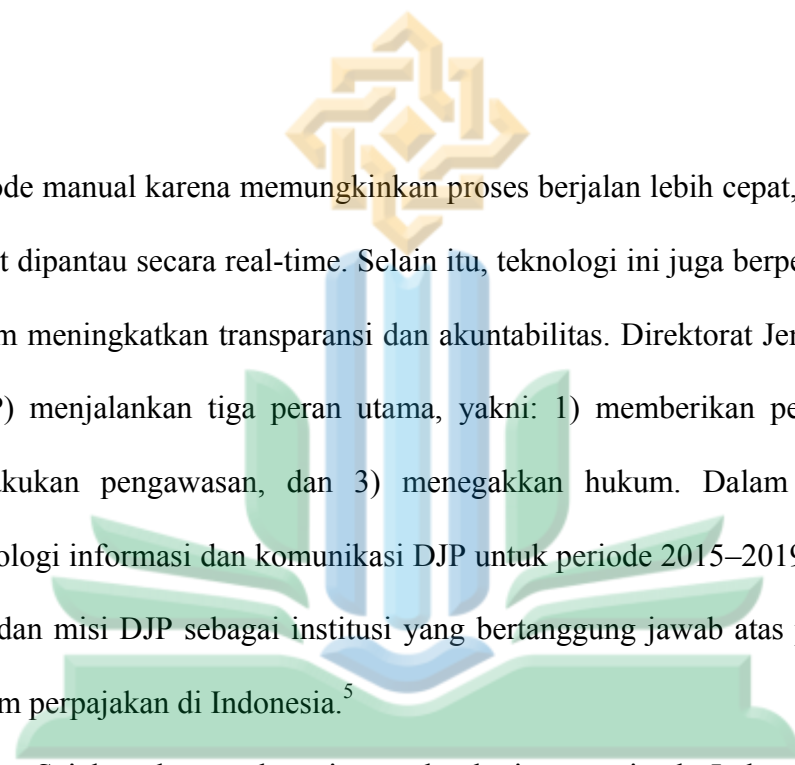
³ Alfani Dewi Kurniawati dkk., "Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada KPP Pratama Jember," *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, Vol. 2, No. 1 (2024): 1-7.



adalah praktik kecurangan dalam pelaporan. Beberapa perusahaan terindikasi memanipulasi laporan keuangan demi mengurangi kewajiban pajak. Akibatnya, negara mengalami kerugian, dan perusahaan yang taat pajak merasa diperlakukan tidak adil. Di samping itu, tantangan teknis juga kerap dihadapi oleh beberapa instansi, terutama terkait dengan infrastruktur digital dan jaringan.

Kemajuan teknologi informasi dan proses digitalisasi telah memberikan dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk dunia bisnis dan administrasi pemerintahan. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah pemanfaatan sistem elektronik yang digunakan untuk menunjang beragam aktivitas, seperti pencatatan data, pelaporan, transaksi pembayaran, hingga komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses dan penggunaannya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal di berbagai bidang. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus mengalami kemajuan, termasuk dalam pengelolaan administrasi publik dan kearsipan. Dalam konteks ini, teknologi dipandang sebagai elemen penting dalam lingkungan administrasi publik. Perkembangan seperti internet pun ikut berperan besar dalam mendorong modernisasi sistem administrasi tersebut. Salah satu aspek yang merasakan dampak langsung dari kemajuan ini adalah sistem perpajakan.⁴ Sistem elektronik dinilai lebih efisien dibandingkan

⁴ Andi Muhammad Dahlan, "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kontrol Perilaku terhadap Penggunaan E-Bupot 23/26 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara" (Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin, 2021), 1

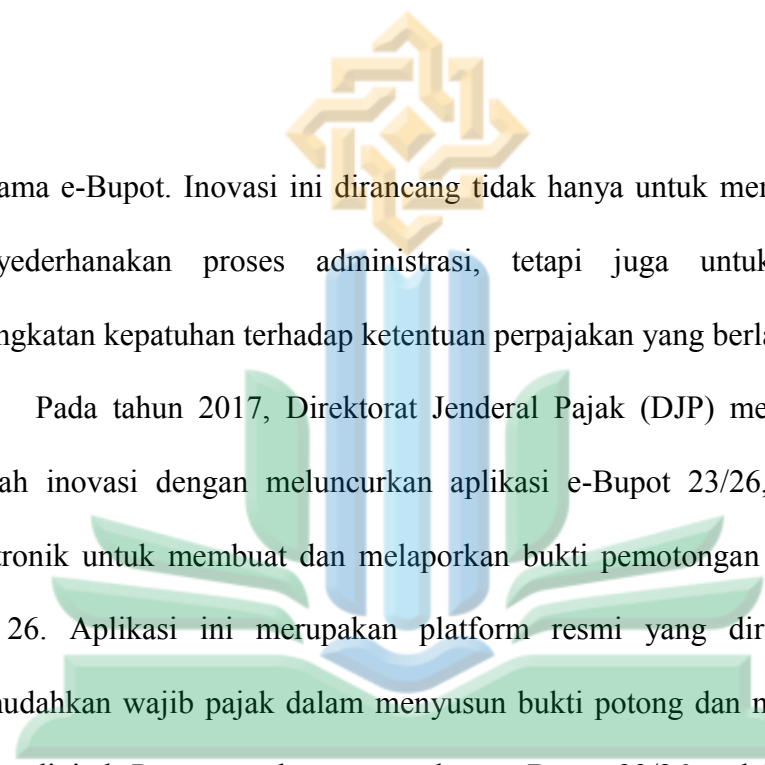


metode manual karena memungkinkan proses berjalan lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau secara real-time. Selain itu, teknologi ini juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan tiga peran utama, yakni: 1) memberikan pelayanan, 2) melakukan pengawasan, dan 3) menegakkan hukum. Dalam cetak biru teknologi informasi dan komunikasi DJP untuk periode 2015–2019, tercantum visi dan misi DJP sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia.⁵

Sejalan dengan kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan mandatnya. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan digitalisasi berbagai layanan pembayaran, termasuk pembayaran melalui sistem elektronik seperti e-Bupot (Elektronik Bukti Potong).⁶ Sistem ini diharapkan dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara lebih tepat waktu, akurat, dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak kini menjadi aspek yang semakin krusial, khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang dihadapkan pada kompleksitas kewajiban perpajakan. Sebagai upaya untuk mempermudah proses tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan inovasi

⁵ Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 46/PJ/2015, 2015, <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16755>.

⁶ Iyaza Zumariz and Dyah Ratnawati, "Analisis Efektifitas DJP Online dalam Pembuatan Bukti Potong (e-Bupot) pada PPh 21" *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2024), 360



bernama e-Bupot. Inovasi ini dirancang tidak hanya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan sebuah inovasi dengan meluncurkan aplikasi e-Bupot 23/26, yaitu sistem elektronik untuk membuat dan melaporkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan 26. Aplikasi ini merupakan platform resmi yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam menyusun bukti potong dan melaporkannya secara digital. Pengguna dapat mengakses e-Bupot 23/26 melalui situs resmi DJP atau saluran resmi lain yang telah disediakan oleh DJP. Menurut Peraturan DJP Nomor PER-04/PJ/2017, E-Bupot adalah aplikasi yang diberikan kepada wajib pajak untuk membantu mereka membuat bukti elektronik tentang pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan mereka. Diharapkan bahwa sistem ini akan meningkatkan pelaporan pajak, terutama untuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang yang memiliki banyak transaksi pemotongan pajak. Meskipun e-Bupot telah diterapkan, masih terbatas penelitian yang meneliti dampaknya terhadap kemudahan pelaporan pajak. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi penting bagi perekonomian nasional dan penerimaan pajak. Sistem ini memungkinkan integrasi data secara real-time antara perusahaan, penerima penghasilan, dan otoritas pajak, sehingga proses pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan akurat, dan dapat dilakukan secara online. Namun, beberapa perusahaan atau instansi masih menghadapi masalah terkait jaringan internet saat

menerapkannya. Sangat penting untuk menggunakan sistem e-Bupot jika jaringan internet tidak stabil atau tidak dapat diakses. Gangguan jaringan atau bug sistem dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pajak dan kesalahan dalam pengisian data.

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam membangun serta mengembangkan infrastruktur dan fasilitas publik di Indonesia, terutama di tingkat daerah. Sebagai instansi pemerintah, dinas ini bertugas mengelola berbagai proyek pembangunan yang meliputi jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan perpajakan yang akurat dan sesuai aturan menjadi aspek penting, termasuk pelaporan pajak dari pendapatan yang diperoleh melalui proyek-proyek tersebut. Ketentuan mengenai perpajakan ini tercantum dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2, yang mengatur tentang penerapan tarif pajak final atas jenis penghasilan tertentu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-Filing dan e-BUPOT berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷ Tetapi masih sedikit penelitian tentang bagaimana E-BUPOT secara khusus mempengaruhi kemudahan pelaporan pajak di sektor jasa konstruksi. Namun, pemahaman mengenai efektivitas penerapan sistem ini masih belum

⁷ Vadira Wardyani and Syamsu Alam, "Pengaruh Kemudahan Dan Pemahaman Penggunaan Sistem E-Filing Dalam Pelaporan Pajak Abstrak Pendahuluan", *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 5, no. 2 (2022), 157



menyeluruh, terutama terkait kemudahan pelaporan pajak. Beberapa perusahaan mungkin masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru, sementara yang lain merasakan peningkatan efisiensi operasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan e-Bupot berperan dalam mempermudah proses pelaporan pajak di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

Sebelum adanya e-Bupot, proses pelaporan pajak cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Mereka harus melakukan perhitungan yang rawan kesalahan, mengumpulkan dokumen pendukung, dan melakukan pencatatan manual. Hal ini dapat menyebabkan penyampaian pelaporan pajak yang tertunda serta kesalahan yang dapat menyebabkan sanksi dari otoritas pajak.

Penelitian ini mengkaji dampak penggunaan sistem e-Bupot terhadap kemudahan pelaporan pajak dengan mempertimbangkan kendala yang dihadapi oleh jaringan. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pemerintah, khususnya DJP, untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem e-Bupot serta memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan memadai untuk pengguna.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi sistem elektronik dan e-Bupot di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember?
2. Apakah e-Bupot lebih efektif dibanding sistem manual?

3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapannya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi penggunaan sistem elektronik dan bukti potong elektronik (e-Bupot) dalam proses pelaporan pajak di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.
2. Mengevaluasi tingkat efektivitas penggunaan e-Bupot dibandingkan dengan sistem pelaporan pajak secara manual yang sebelumnya digunakan.
3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem e-Bupot, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung di lingkungan instansi pemerintah daerah..

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada nilai atau kontribusi yang dihasilkan setelah penelitian dilakukan. Manfaat ini dapat bersifat teoritis maupun praktis, baik bagi peneliti sendiri, instansi terkait, maupun masyarakat secara umum. Penting untuk memastikan bahwa manfaat yang dikemukakan bersifat realistis dan dapat dicapai.



1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan administrasi publik. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi sistem elektronik perpajakan seperti e-Bupot, serta memberikan referensi ilmiah bagi studi-studi sejenis terkait efektivitas dan tantangan digitalisasi dalam sistem pelaporan pajak di sektor pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Instansi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember, sebagai bahan evaluasi atas implementasi sistem e-Bupot, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak dan mengatasi kendala teknis yang ada.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperoleh masukan terkait pelaksanaan e-Bupot di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi peningkatan pelayanan dan sistem yang lebih optimal.

Wajib pajak instansi dan bendahara pengeluaran, agar lebih memahami manfaat penggunaan sistem e-Bupot, serta lebih siap dalam menghadapi hambatan teknis maupun administratif.

Peneliti selanjutnya, sebagai acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian lanjutan terkait digitalisasi perpajakan atau studi implementasi sistem informasi perpajakan di sektor publik.

E. Definisi Istilah

1. Penggunaan Sistem Elektronik

Penggunaan sistem elektronik melibatkan berbagai aktivitas yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mendukung proses administrasi, operasional, serta layanan publik maupun swasta. Aktivitas ini dapat mencakup akses layanan secara online, pengiriman data atau transaksi secara real-time, hingga pelaporan informasi melalui platform elektronik seperti situs web, aplikasi mobile, atau perangkat lunak berbasis cloud. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual atau berbasis dokumen fisik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Sistem elektronik memberikan akses yang mudah bagi pengguna. Ini mencakup navigasi antarmuka yang sederhana, kemampuan login dari berbagai perangkat (seperti ponsel dan komputer), dan panduan yang jelas untuk meminimalkan kebingungan pengguna.

Kualitas sistem informasi menurut Direktorat Jenderal Pajak mencakup fitur, kinerja, dan tampilan antarmuka pengguna.⁸ Kualitas sistem sendiri merupakan gabungan antara perangkat keras dan perangkat

⁸ kppn050@kemenkeu.go.id, “PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SAKTI PADA KPPN GORONTALO,” 2022, <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo/id/data-publikasi/artikel/2920-pengaruh-kualitas-sistem,-kualitas-informasi-dan-kualitas-layanan-terhadap-kepuasan-pengguna-sakti-pada-kppn-gorontalo.html>.

lunak dalam sebuah sistem. Penilaian terhadap sistem informasi didasarkan pada pencapaian aspek teknis. Sedangkan tingkat teknis komunikasi diartikan sebagai akurasi dan efisiensi dalam sistem komunikasi yang menghasilkan pesan.⁹

2. Bukti Potong E-Bupot

Bukti Potong E-Bupot merupakan dokumen elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat pemotongan pajak yang dilakukan terhadap pihak ketiga, seperti karyawan, rekan bisnis, atau pihak lain yang menerima penghasilan yang dikenai pajak. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, E-Bupot (Elektronik Bukti Potong) merupakan bentuk digital dari bukti pemotongan pajak, yang diterbitkan melalui sistem pajak online resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), misalnya aplikasi e-Bupot Unifikasi. Sistem ini memungkinkan wajib pajak yang melakukan pemotongan pajak (seperti perusahaan) untuk menerbitkan bukti potong elektronik sebagai dokumen sah. E-Bupot tidak hanya menggantikan bukti potong manual tetapi juga memastikan bahwa informasi tentang pemotongan pajak disimpan dalam bentuk digital dan dapat diakses atau diverifikasi kapan saja. Aplikasi ini mempermudah proses perpajakan dengan memungkinkan Wajib Pajak dapat membuat dan mengeluarkan bukti potong pajak secara elektronik tanpa harus menggunakan tanda tangan manual. Dasar hukum penggunaan e-Bupot ini

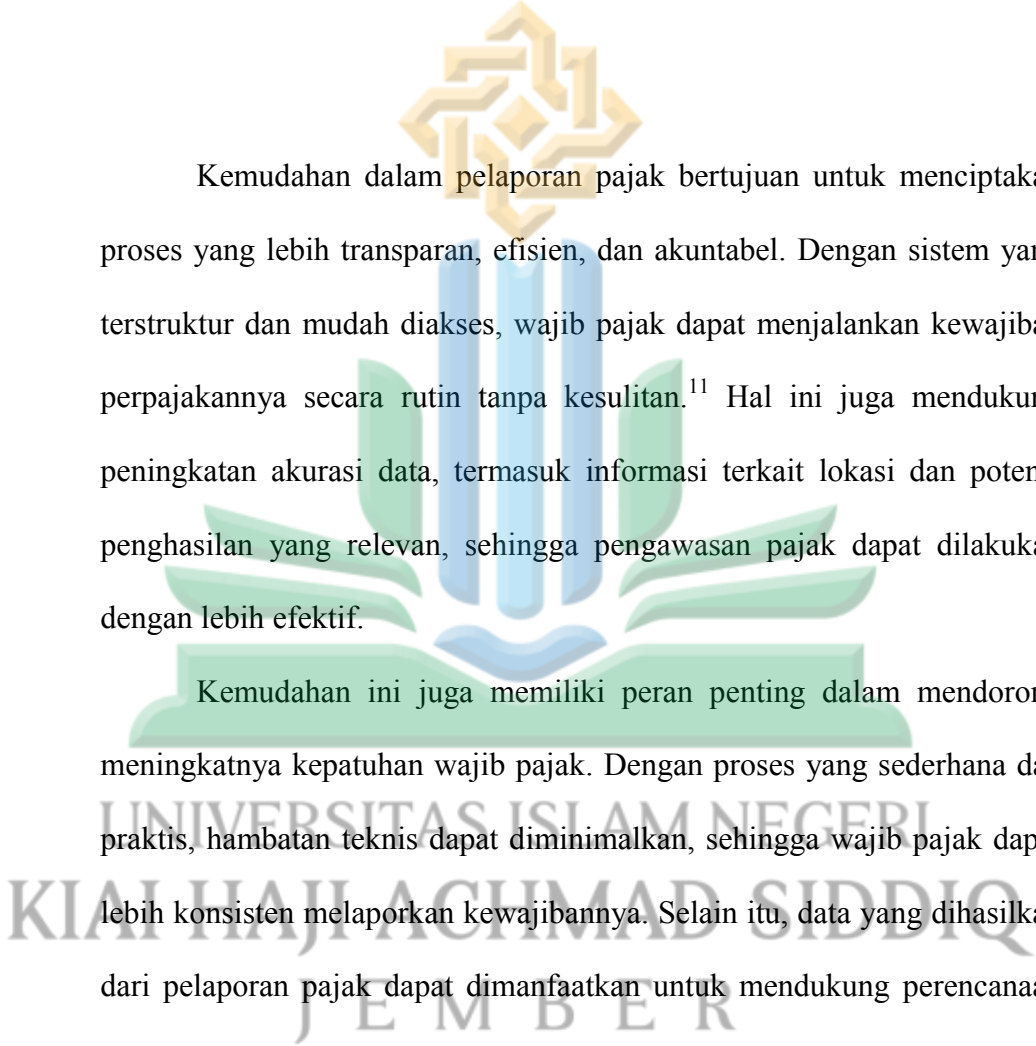
⁹ Mahda Karina and Dr. Binsar H Simanjuntak, "Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol 22, no. 1 (2022), 167
<https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12627>.

diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, yang mengatur tentang isi, bentuk, cara pengisian, serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26, termasuk juga bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pada Pasal 23 dan Pasal 26.¹⁰

3. Kemudahan Pelaporan Pajak

Kemudahan pelaporan pajak adalah tingkat kenyamanan, efisiensi, dan efektivitas yang dirasakan oleh pengguna dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meliputi pengisian, pengumpulan, dan pengiriman laporan pajak kepada otoritas terkait. Hal ini ditandai oleh aksesibilitas sistem yang memadai, waktu pelaporan yang lebih efisien, serta keakuratan data yang terjamin berkat fitur validasi otomatis. Selain itu, kemudahan ini juga terlihat dari adanya bantuan teknis yang responsif, desain antarmuka yang ramah pengguna, dan pengurangan beban administratif melalui digitalisasi proses. Kemudahan pelaporan pajak mencerminkan bagaimana teknologi dan sistem yang digunakan dapat mengurangi hambatan yang biasanya terjadi, seperti proses manual yang rumit atau keterlambatan akibat kendala teknis. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melaporkan pajak dengan lebih sederhana, cepat, dan sesuai peraturan.

¹⁰ Riza Rahmady Daeng and Mahmudi, "Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *NCAF proceeding of national conference on accounting and finance*, Vol. 4 (2022), 14 , <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>.



Kemudahan dalam pelaporan pajak bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan sistem yang terstruktur dan mudah diakses, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara rutin tanpa kesulitan.¹¹ Hal ini juga mendukung peningkatan akurasi data, termasuk informasi terkait lokasi dan potensi penghasilan yang relevan, sehingga pengawasan pajak dapat dilakukan dengan lebih efektif.

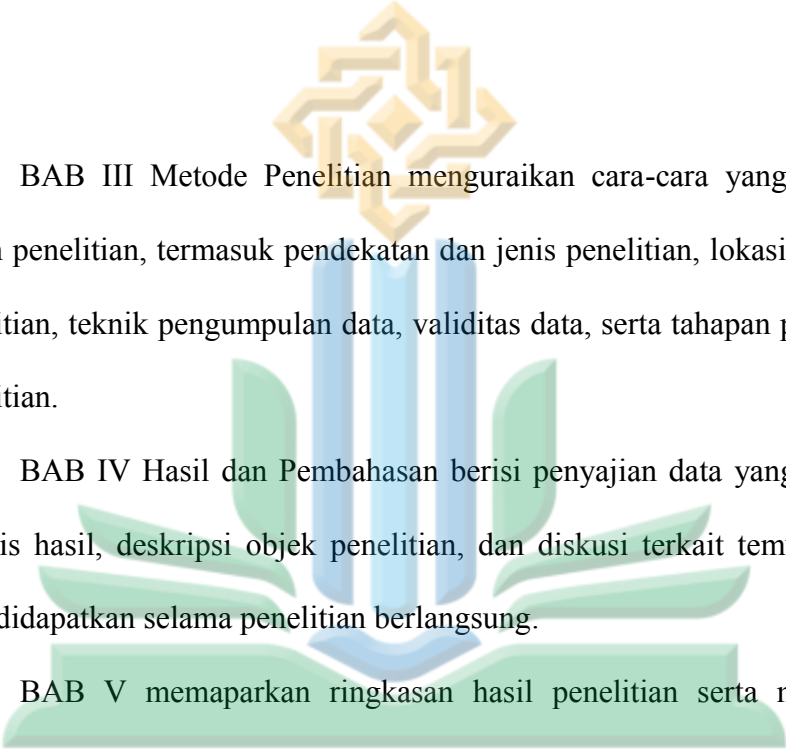
Kemudahan ini juga memiliki peran penting dalam mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dengan proses yang sederhana dan praktis, hambatan teknis dapat diminimalkan, sehingga wajib pajak dapat lebih konsisten melaporkan kewajibannya. Selain itu, data yang dihasilkan dari pelaporan pajak dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan keuangan individu maupun pengelolaan strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, fokus yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, definisi istilah penting, serta gambaran sistematika penulisan.

BAB II Metode pembahasan memuat ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik saat ini, sekaligus membahas teori-teori yang mendasari penelitian.

¹¹ Robert Philip Keliat, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Pelaporan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia" (Skripsi Sarjana, Universitas Medan Area, 2021), 8



BAB III Metode Penelitian menguraikan cara-cara yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan berisi penyajian data yang diperoleh, analisis hasil, deskripsi objek penelitian, dan diskusi terkait temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian berlangsung.

BAB V memaparkan ringkasan hasil penelitian serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mengumpulkan dan menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, kemudian merangkum temuan-temuan tersebut, termasuk penelitian yang sudah dipublikasikan. Proses ini membantu peneliti memahami sejauh mana tingkat orisinalitas serta posisi penelitian yang akan dilakukan dalam konteks studi sebelumnya.

1. Ratu Intan dan Ni Made Sri Wardani (2024), "Analisis Kepatuhan PPh Pasal 23 dan 26 Menggunakan E-Bupot Unifikasi pada PT AJC", Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen, Politeknik Negeri Jakarta.¹²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada PT AJC dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, implementasi e-Bupot Unifikasi telah memberikan manfaat dalam hal efisiensi waktu dan fleksibilitas pelaporan pajak.

2. Khairunnisa Adityaningrum, Hayati Fatimah, "Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23

¹² Ratu Intan, Ni Made Sri Wardani, "Analisis Kepatuhan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Menggunakan E-Bupot Unifikasi Pada PT AJC" *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 5 (2024), 8

pada PT XYZ”, (2024), Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen, Politeknik Negeri Jakarta.¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e- bupot unifikasi dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT XYZ telah memiliki sertifikat elektronik untuk menggunakan e-bupot unifikasi. Namun, PT XYZ belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum memenuhi sebagai syarat wajib pajak patuh. Dalam penyeteroran PPh Pasal 23 PT XYZ masih mengalami keterlambatan sehingga dikenakan denda sebesar 2%. PT XYZ juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 23. Selain mengalami keterlambatan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23, laporan keuangan PT XYZ selama tiga tahun terakhir belum pernah dilakukan audit. Namun, PT XYZ tidak pernah mendapatkan hukuman pidana dalam bidang perpajakan dan tidak terlambat dalam melakukan pelaporan SPT pada tahun 2023. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas efektivitas e-Bupot dalam pelaporan.

3. Iyaza Zumariz, Dyah Ratnawati, ”Analisis Efektifitas Djp Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada Pph 21”, (2024), KINERJA

¹³ Khairunnisa Adityaningrum, Hayati Fatimah, “Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ”, Vol. 3, (2024), 3

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.¹⁴

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan pembekalan yang diberikan berhasil meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghitung, membuat e-Bupot, dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, seperti dukungan dari pimpinan dan staf perusahaan, tingginya antusiasme karyawan, serta tersedianya fasilitas yang memadai. Persamaan dari penelitian ini adalah menjelaskan perubahan dari sistem pelaporan pajak manual ke sistem digital yang lebih terintegrasi.

4. Ni Kadek Intan Prima Putri, "Analisis Penerapan E-Bupot Pph 21 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 (Studi Kasus PT. Bali General Supply)", (2024), Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot PPh pasal 21 di PT. Bali General Supply telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala seperti koneksi internet yang tidak stabil dan pemahaman yang kurang terhadap penggunaan sistem baru ini. Meskipun demikian, sistem e-Bupot mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

¹⁴ Iyaza Zumariz, Dyah Ratnawati, "Analisis Efektifitas Djp Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada Pph 21", *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, 01 (2024), 167

¹⁵ Ni Kadek Intan Prima Putri, "Analisis Penerapan E-Bupot Pph 21 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 (Studi Kasus PT. Bali General Supply)" (2024), (skripsi, Politeknik Negeri Bali).

dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu e-SPT. Penerapan e-Bupot juga membantu mengurangi risiko sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan.

5. Nuraditya Puspitasari, "Analisis Penerapan Bukti Potong E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah pada Satker BPS Brebes", (2023), Program Studi DIII Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal.¹⁶

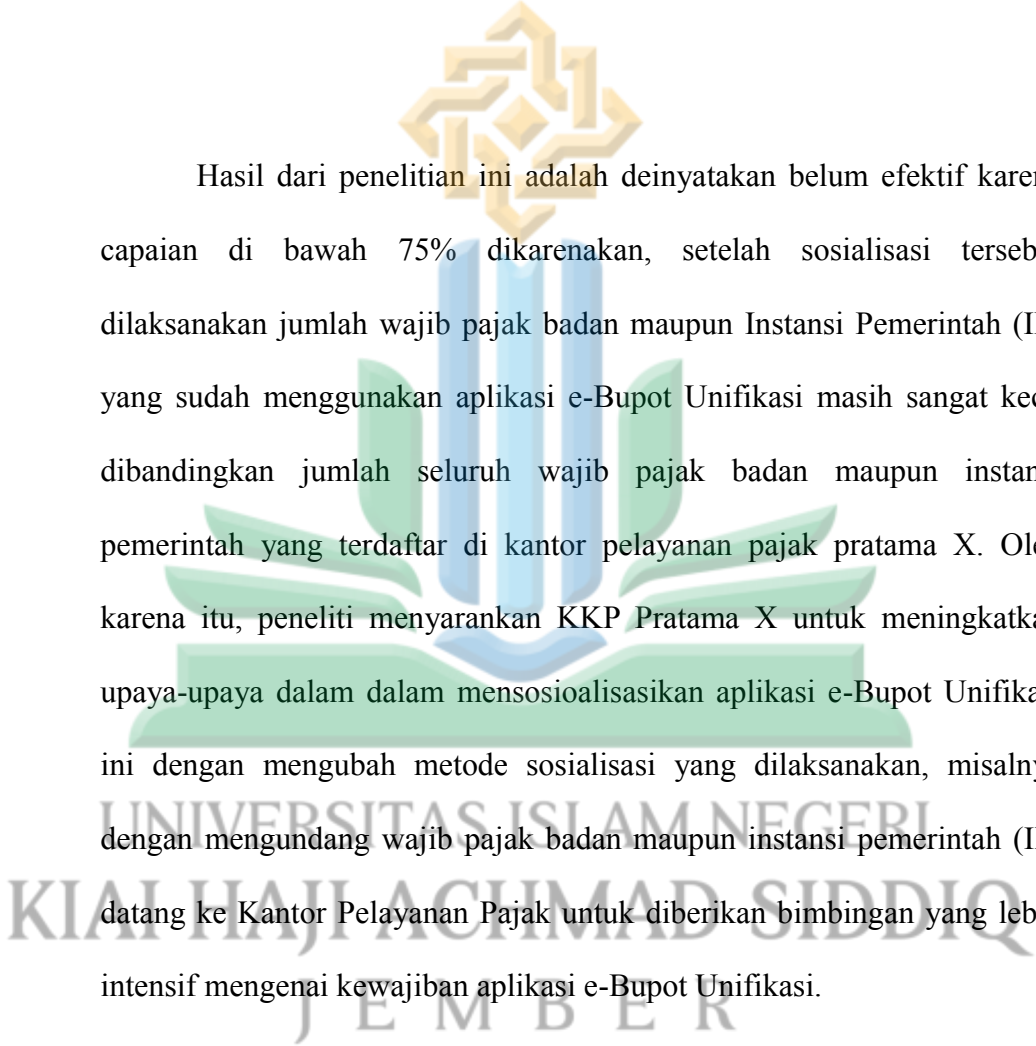
Hasil penelitian ini menunjukkan BPS sudah menerapkan aplikasi tersebut sejak tahun 2021 dan dalam pembuatan bukti potong dalam pelaporan telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Penerapan buktipotong elektronik Unifikasi ini juga memiliki perbedaan yang *signifikan* dengan aplikasi yang sebelumnya yang lebih memdahkan wajib pajak dan lebih efisien dalam pelaporan atau penyetoran masa pajak.

Persamaan dari penelitian ini adalah fokus pada instansi pemerintah, penggunaan sistem elektronik & e-Bupot.

6. Eldiva Wulanda, Lia Ekowati, "Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum dan Sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi pada KPP Pratama X", (2023), Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen, Politeknik Negeri Jakarta.¹⁷

¹⁶ Nuraditya Puspitasari, "Analisis Penerapan Bukti Potong E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah pada Satker BPS Brebes," (2023), (skripsi, Politeknik Harapan Bersama Tegal)

¹⁷ Eldiva Wulanda, Lia Ekowati, "Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum dan Sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi pada KPP Pratama X," *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 3, (2023), 2



Hasil dari penelitian ini adalah dinyatakan belum efektif karena capaian di bawah 75% dikarenakan, setelah sosialisasi tersebut dilaksanakan jumlah wajib pajak badan maupun Instansi Pemerintah (IP) yang sudah menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi masih sangat kecil dibandingkan jumlah seluruh wajib pajak badan maupun instansi pemerintah yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama X. Oleh karena itu, peneliti menyarankan KKP Pratama X untuk meningkatkan upaya-upaya dalam mensosialisasikan aplikasi e-Bupot Unifikasi ini dengan mengubah metode sosialisasi yang dilaksanakan, misalnya dengan mengundang wajib pajak badan maupun instansi pemerintah (IP) datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan bimbingan yang lebih intensif mengenai kewajiban aplikasi e-Bupot Unifikasi.

7. Mahda Karina, Dr. Binsar H Simanjuntak, "Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26", (2022), Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Universitas Trisakti.¹⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan e-Bupot 23/26. Namun, kepuasan pengguna dan pemahaman tentang perpajakan ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa fitur-fitur pada aplikasi masih belum maksimal, sehingga berdampak pada tingkat kepuasan pengguna.

¹⁸ Karina and H Simanjuntak, "Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 22 (2023), 158

Persamaan dengan penelitian lain adalah keduanya sama-sama membahas kendala yang sering muncul saat mengakses e-Bupot, seperti masalah jaringan atau adanya bug pada sistem.

8. Imanuel Zefanya, "Pelaporan Pajak Penghasilan Bulanan Pasal 23 dengan e-Bupot pada PT DG", (2022), Program Studi Akuntansi D-III Fakultas Vokasi, Universitas Katolik Widya Mandala.¹⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan melalui e-Bupot yang dilaksanakan selama kegiatan PKL, ditemukan kendala pada sistem e-Bupot yang mengalami error dan mempengaruhi pelaporan PPh Pasal 23 milik PT DG, namun dapat diselesaikan dengan me-refresh kembali laman e-Bupot sehingga proses pelaporan PPh Pasal 23 milik PT DG dapat berjalan kembali. Pelaporan PPh Pasal 23 di e-Bupot dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi yang merupakan penyederhanaan dari berbagai jenis SPT Masa PPh yang terdiri dari pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat 2, pasal 15, dan pasal 22 yang dijadikan satu. SPT Masa Unifikasi berguna untuk memudahkan dan mengurangi kerumitan dalam pelaporan di e-Bupot, e-Bupot membantu pelaporan, kendala teknis masih muncul, tapi bisa diatasi.

Persamaan dari penelitian ini adalah mencatat tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem elektronik, seperti masalah teknis.

¹⁹ Imanuel Zefanya, "Pelaporan Pajak Penghasilan Bulanan Pasal 23 dengan e-Bupot pada PT DG,"(skripsi Universitas Katolik Widya Mandala), 2022

9. Fitria Arianty, Desi, "Analisis Penerapan Azas Ease Of Adminsitration Pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot)", (2021), Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Universitas Indonesia.²⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan aplikasi e Bupot, kewajiban pemotong pajak dalam hal penghitungan, pembuatan bukti potong, serta pelaporan SPT Masa PPh menjadi lebih mudah, sederhana, efisien. Penyederhanaan administrasi perpajakan dalam penggunaan aplikasi e-Bupot telah memenuhi Azas Ease of Administration, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan seperti adanya kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi e-Bupot, ketidakstabilan jaringan dan server DJP Online. Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pemotong pajak berbasis online memerlukan kesiapan perangkat, jaringan, serta kemampuan mengoperasikan perangkat elektronik. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak harus terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas sosialisasi penggunaan aplikasi berbasis elektronik ini kepada wajib pajak.

10. Andi Muhammad Dahlan, "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kontrol Perilaku Terhadap Penggunaan E-Bupot 23/26 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara" , (2021), Departemen

²⁰ Fitria Arianty, Desi, " Analisis Penerapan Azas Ease Of Adminsitration Pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot)," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 4, (2021), 67

Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.²¹

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh persepsi kegunaan e-Bupot, persepsi kemudahan, dan persepsi kontrol perilaku terhadap penggunaan e-Bupot 23/26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-Bupot 23/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Sementara itu, persepsi kemudahan dan persepsi kontrol perilaku tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan e-Bupot 23/26. Kondisi ini terjadi karena aplikasi e-Bupot 23/26 masih tergolong baru bagi banyak Wajib Pajak, sehingga aspek kemudahan dan kontrol perilaku belum sepenuhnya dianggap penting oleh pengguna.

Persamaan dari penelitian ini adalah fokus pada penggunaan sistem elektronik bukti potong (e-Bupot) dan dampaknya terhadap efisiensi atau kemudahan dalam proses perpajakan.

²¹ Andi Muhammad Dahlan, "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Dan Kontrol Perilaku Terhadap Penggunaan E-Bupot 23/26 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara." (skripsi Universitas Hasanuddin Makassar)



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ratu Intan dan Ni Made Sri Wardani "Analisis Kepatuhan PPh Pasal 23 dan 26 Menggunakan E-Bupot Unifikasi pada PT AJC", (2024)	a. Fokus pembahasan e-Bupot sebagai bagian dari digitalisasi administrasi perpajakan. b. Sama-sama menilai pelaporan PPh 23/26 dan efektivitas aplikasi	a. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif b. Studi kasus pada perusahaan swasta (PT AJC), bukan instansi pemerintah
2.	Khairunnisa Adityaningrum, Hayati Fatimah, "Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ", (2024)	a. Penerapan E-Bupot dalam sistem perpajakan di Indonesia b. Sama-sama menilai implementasi e-Bupot dalam pelaporan PPh	a. Menyoroti aspek denda dan kepatuhan formal perusahaan b. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
3.	Iyaza Zumariz, Dyah Ratnawati, "Analisis Efektifitas Djp Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada Pph 21", (2024)	a. Fokus penelitian menyoroti penggunaan e-Bupot dalam pelaporan pajak.	a. Tujuan dan ruang lingkup, penelitian sebelumnya membahas penerapan e-Bupot Unifikasi secara lebih luas, termasuk analisis situasi dan solusi praktis untuk optimalisasi arsip pajak.
4.	Ni Kadek Intan Prima Putri, "Analisis Penerapan E-Bupot Pph 21 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 (Studi	a. Topik penelitian, menekankan penggunaan teknologi, yaitu sistem elektronik dan e-Bupot, untuk meningkatkan efisiensi dalam	a. Objek penelitian, penelitian ini menggunakan PT. Bali General Supply

	Kasus PT. Bali General Supply)", (2024)	pelaporan.	
5.	Nuraditya Puspitasari, "Analisis Penerapan Bukti Potong E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah pada Satker BPS Brebes", (2023)	a. Membahas efektivitas dan implementasi e-Bupot Unifikasi b. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	a. Fokus pada instansi pemerintah (BPS)
6.	Eldiva Wulanda, Lia Ekowati, "Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum dan Sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi pada KPP Pratama X", (2023)	a. Menekankan pentingnya teknologi dalam mendukung administrasi perpajakan. b. Membahas efektivitas aplikasi e-Bupot Unifikasi	a. Objek penelitian ini menggunakan KKP Pratama X
7.	Mahda Karina, Dr. Binsar H Simanjuntak, "Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26", (2022)	a. Menekankan pentingnya pemanfaatan sistem elektronik untuk meningkatkan kemudahan dan efektivitas dalam pelaporan pajak. b. Membahas topik perpajakan dengan fokus pada penerapan sistem elektronik.	a. Variabel penelitian b. Objek penelitian, penelitian ini menggunakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat.
8.	Imanuel Zefanya, "Pelaporan Pajak Penghasilan Bulanan Pasal 23 dengan e-Bupot pada PT DG", (2022),	a. Mengkaji manfaat sistem elektronik, terutama e-Bupot b. Sama-sama membahas PPh 23 dan pelaporan pajak melalui e-Bupot	a. Objek yang digunakan berupa perusahaan swasta, bukan instansi pemerintahan daerah
9.	Fitria Arianty, Desi, "Analisis Penerapan Azas Ease Of Adminsitration Pada	a. Menilai kemudahan administrasi dalam penggunaan e-	a. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dan asas perpajakan,

	Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot)", (2021)	Bupot b. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif	bukan implementasi langsung di lapangan
10.	Andi Muhammad Dahlan, "Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kontrol Perilaku Terhadap Penggunaan E-Bupot 23/26 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara", (2021)	a. efisiensi dan kemudahan yang diberikan oleh e-Bupot dalam proses pelaporan pajak b. tantangan dalam implementasi teknologi	a. variabel penelitian b. objek penelitian, penelitian ini menggunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sebagai objek penelitian.

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2025

Aplikasi e-Bupot terbukti membawa banyak manfaat, terutama dalam hal efisiensi dan ketepatan saat melaporkan pajak. Banyak pengguna merasa bahwa proses pembuatan bukti potong jadi jauh lebih cepat dan praktis, sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan produktivitas meningkat. Selain itu, penggunaan e-Bupot juga membantu mengurangi kesalahan yang biasanya sering terjadi saat proses dilakukan secara manual.²²

Meski secara sistem e-Bupot menawarkan banyak keunggulan, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kurang maksimalnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X. Meskipun kegiatan sosialisasi telah dilakukan, jumlah badan usaha maupun Instansi Pemerintah (IP) yang benar-benar menggunakan e-Bupot masih tergolong sedikit dibandingkan total wajib

²² Iyaza Zumariz, Dyah Ratnawati, "Analisis Efektifitas Djp Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada Pph 21", *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, 01 (2024)

pajak yang terdaftar. Minimnya pelatihan dan penyuluhan turut memengaruhi persepsi kemudahan penggunaan aplikasi ini, yang belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh para wajib pajak.²³

Dengan demikian, meskipun secara teknis e-Bupot terbukti membawa manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan produktivitas, penerapannya masih belum sepenuhnya efektif. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat penggunaan di kalangan wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya lebih dari pihak KPP, khususnya dalam hal sosialisasi dan pendampingan, agar e-Bupot dapat digunakan secara lebih luas dan optimal oleh seluruh wajib pajak yang terdaftar.

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa teori, di antaranya:

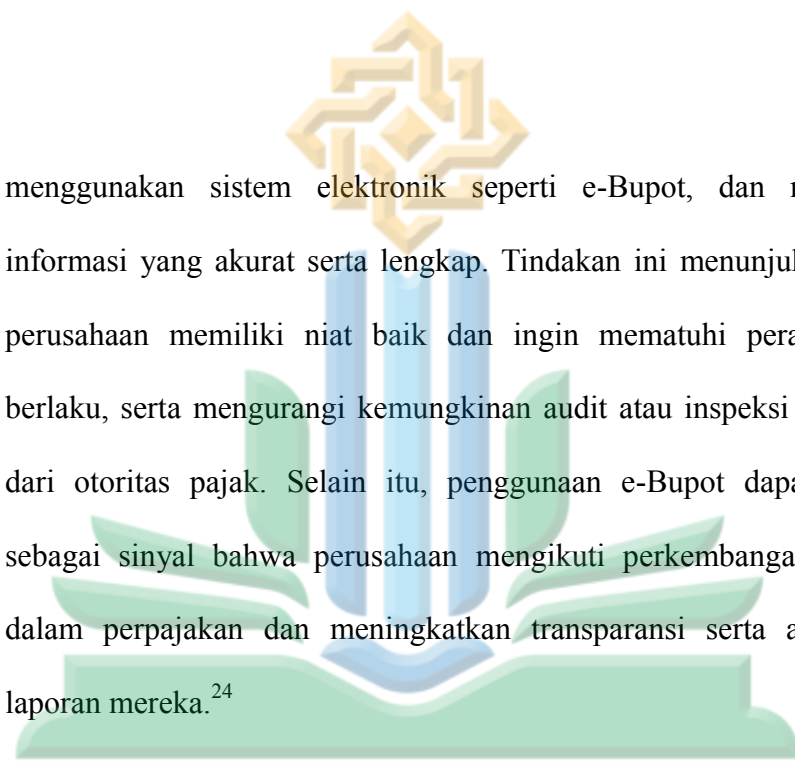
1. *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

a. Penegrtian *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Teori Sinyal atau *Signalling Theory* adalah konsep yang menjelaskan cara sebuah pihak menyampaikan informasi kepada pihak lain dalam situasi asimetri informasi, yaitu kondisi di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya.

Dalam akuntansi dan perpajakan, teori sinyal diterapkan ketika perusahaan mengirimkan sinyal positif kepada pemerintah atau otoritas pajak, misalnya dengan melaporkan pajak secara tepat waktu,

²³ Iyaza Zumariz, Dyah Ratnawati, “Analisis Efektifitas Djp Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada Pph 21”, *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, 01 (2024)



menggunakan sistem elektronik seperti e-Bupot, dan memberikan informasi yang akurat serta lengkap. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki niat baik dan ingin mematuhi peraturan yang berlaku, serta mengurangi kemungkinan audit atau inspeksi lebih lanjut dari otoritas pajak. Selain itu, penggunaan e-Bupot dapat dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dalam perpajakan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan mereka.²⁴

b. Komponen Fungsi *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

1) Menjelaskan perilaku pelaporan pajak yang transparan

Instansi menggunakan e-Bupot sebagai sinyal bahwa mereka ingin patuh, transparan, dan akuntabel.

2) Mengurangi asimetri informasi

DJP tidak perlu curiga terhadap manipulasi karena laporan e-Bupot tersimpan digital dan bisa dilacak.

3) Meningkatkan kepercayaan pihak eksternal

Stakeholder seperti DJP, auditor, dan masyarakat lebih percaya pada lembaga yang menggunakan sistem digital.

4) Mendorong citra institusi yang profesional

Penggunaan teknologi modern menandakan instansi adaptif terhadap inovasi.

²⁴ Rahima Br Purba, *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akutansi* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2023).

- 5) Membedakan antara instansi yang patuh dan tidak patuh

Instansi yang menggunakan e-Bupot dengan benar bisa dibedakan dari yang belum menggunakannya.

c. **Komponen *Signalling Theory* (Teori Sinyal)**

Signalling Theory terdiri dari beberapa komponen utama yaitu:

- 1) Pengirim Sinyal (*Signal Sender*)

Pihak yang memiliki informasi lebih dan ingin menyampaikan kualitas atau niat baiknya. Yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.

- 2) Sinyal (*Signal*)

Tindakan atau atribut yang dikomunikasikan untuk menunjukkan nilai atau komitmen tertentu.

- 3) Penerima Sinyal (*Signal Receiver*)

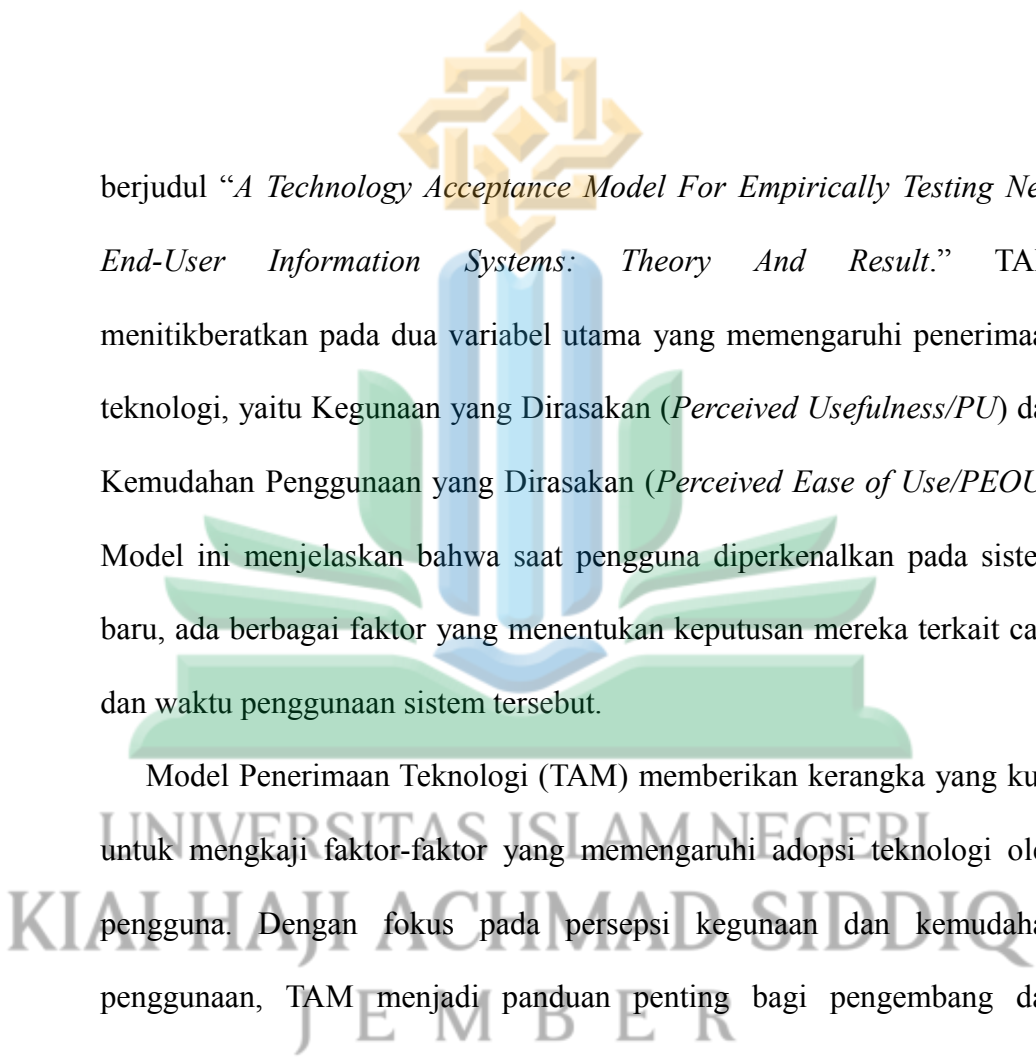
Pihak yang menafsirkan sinyal dan mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut.

- 4) Tanggapan terhadap Sinyal (*Response*)

Respons dari penerima sinyal yang mempercayai atau menilai sinyal tersebut valid.

2. ***Technology Acceptance Model* (TAM)**

Technology Acceptance Model (TAM) adalah salah satu model yang paling sering digunakan untuk memahami dan memprediksi bagaimana pengguna menerima teknologi informasi. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 melalui disertasinya yang



berjudul “*A Technology Acceptance Model For Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory And Result.*” TAM menitikberatkan pada dua variabel utama yang memengaruhi penerimaan teknologi, yaitu Kegunaan yang Dirasakan (*Perceived Usefulness/PU*) dan Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan (*Perceived Ease of Use/PEOU*). Model ini menjelaskan bahwa saat pengguna diperkenalkan pada sistem baru, ada berbagai faktor yang menentukan keputusan mereka terkait cara dan waktu penggunaan sistem tersebut.

Model Penerimaan Teknologi (TAM) memberikan kerangka yang kuat untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi oleh pengguna. Dengan fokus pada persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, TAM menjadi panduan penting bagi pengembang dan peneliti untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diterima oleh pengguna. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan TAM dengan menambahkan variabel baru yang relevan agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.²⁵

- a. *Perceived Usefulness* (PU): Berdasarkan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan performanya. Semakin besar keyakinan seseorang terhadap keuntungan yang bisa diperoleh dari teknologi tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menerima dan menggunakannya.

²⁵ Andrina Granić Fred D. Davis, *The Technology Acceptance Model 30 Years of TAM* (swiss: Springer, 2020).

- b. *Perceived Ease of Use* (PEOU): Merujuk pada tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tersebut tidak memerlukan banyak upaya. Ketika teknologi dinilai mudah digunakan, pengguna biasanya lebih mau menerima dan mengaplikasikannya.

Technology Acceptance Model (TAM) memiliki beberapa komponen fungsi pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Menganalisis penerimaan teknologi

TAM membantu memahami apakah pegawai menerima atau menolak e-Bupot.

- 2) Menjelaskan perilaku pengguna

- 3) Mengukur efektivitas sistem dari sudut pengguna

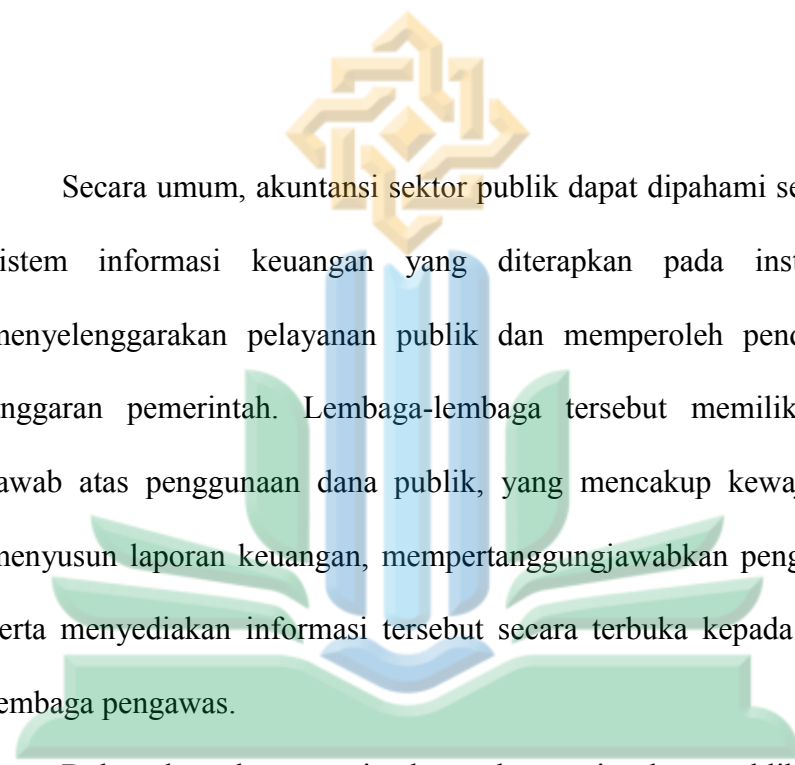
TAM bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem sudah memenuhi ekspektasi.

- 4) Memberikan dasar evaluasi dan perbaikan sistem, jika PEOU rendah, berarti sistem perlu disederhanakan.

- 5) Menghubungkan aspek teknis dan perilaku manusia, yaitu TAM menjembatani antara fitur sistem dan respons pengguna.

4. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan di instansi pemerintah atau lembaga publik. Tidak seperti entitas bisnis yang bertujuan memperoleh laba, sektor publik lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kepentingan bersama.

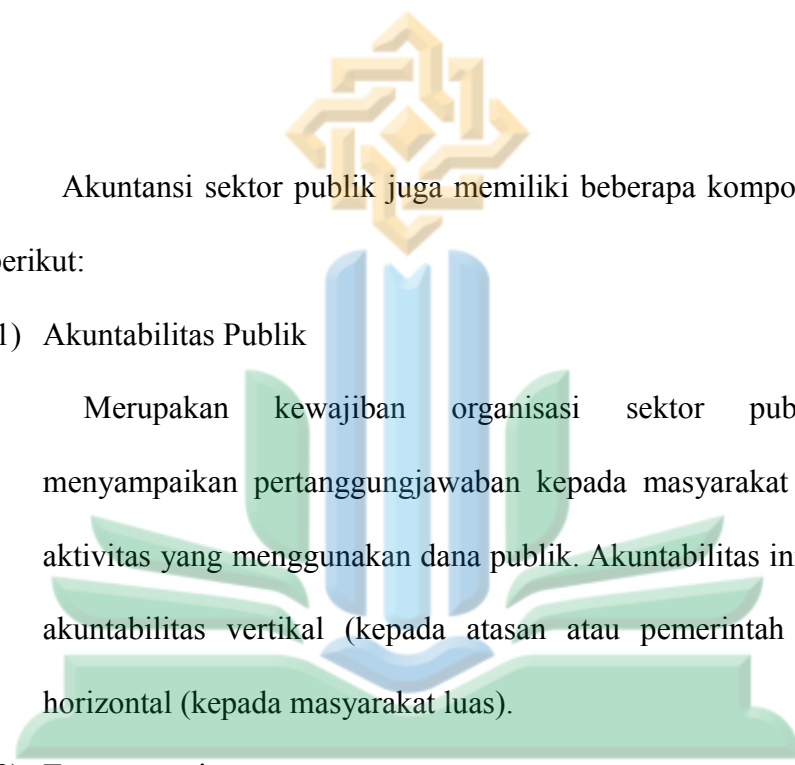


Secara umum, akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu sistem informasi keuangan yang diterapkan pada institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memperoleh pendanaan dari anggaran pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab atas penggunaan dana publik, yang mencakup kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, mempertanggungjawabkan penggunaannya, serta menyediakan informasi tersebut secara terbuka kepada publik dan lembaga pengawas.

Dalam konteks pemerintahan, akuntansi sektor publik mencakup seluruh aktivitas pencatatan, pengukuran, pelaporan, serta pengawasan terhadap transaksi keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap dana publik dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebih lanjut, akuntansi sektor publik berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola keuangan negara dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, akuntansi ini juga menjadi sarana bagi manajemen publik untuk menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat dan lembaga legislatif. Dengan demikian, pelaporan keuangan di sektor publik tidak hanya dimaknai sebagai bentuk evaluasi internal, tetapi juga sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan legal kepada publik.²⁶

²⁶ Sarsiti, *Akuntansi Sektor Publik* (Cirebon: Green Publisher, 2020), 3



Akuntansi sektor publik juga memiliki beberapa komponen sebagai berikut:

1) Akuntabilitas Publik

Merupakan kewajiban organisasi sektor publik untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas segala aktivitas yang menggunakan dana publik. Akuntabilitas ini terdiri dari akuntabilitas vertikal (kepada atasan atau pemerintah pusat) dan horizontal (kepada masyarakat luas).

2) Transparansi

Transparansi diwujudkan dalam bentuk ketersediaan informasi publik yang terbuka dan dapat diakses. Dalam konteks pelaporan keuangan, transparansi berfungsi untuk menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran tercatat dengan jelas dan dapat diverifikasi.

3) *Value for Money* (VFM)

Konsep ini mencakup tiga prinsip utama:

- Ekonomi: penggunaan input secara hemat dan efisien,
- Efisiensi: perbandingan optimal antara input dan output,
- Efektivitas: sejauh mana output dapat memenuhi tujuan dan hasil yang diharapkan (outcome).

Konsep VFM menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara efisien dan berorientasi hasil.

4) *Good Governance*

Implementasi e-Bupot mencerminkan prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi.

5) Laporan Keuangan & Pelaporan

Akuntansi sektor publik mendukung implementasi prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, supremasi hukum (rule of law), transparansi, responsivitas, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas. Good governance menuntut sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan yang bersih dan profesional.

Adapun komponen fungsi akuntansi sektor publik terhadap penelitian ini, yaitu:

- 1) Menjelaskan pentingnya akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam pelaporan pajak.
- 2) Menunjukkan bagaimana e-Bupot mendukung transparansi dan efisiensi dalam proses pelaporan pemotongan PPh.
- 3) Mengukur sejauh mana sistem elektronik ini mendukung prinsip Value for Money, melalui penghematan waktu, biaya, dan potensi kesalahan dalam proses administrasi.
- 4) Menguatkan peran teknologi informasi sebagai sarana implementasi good governance di instansi pemerintah.

Dengan demikian, implementasi e-Bupot oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai bagian dari praktik akuntansi sektor publik yang baik, yang

tidak hanya menekankan aspek teknis pelaporan, tetapi juga aspek normatif dan tata kelola.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Metode ini diterapkan untuk mempelajari objek dalam kondisi alami tanpa manipulasi, berbeda dengan metode eksperimen. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan menggunakan teknik triangulasi (kombinasi beberapa teknik), analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif, serta hasil penelitian lebih fokus pada pemahaman makna daripada pada generalisasi.²⁷

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui observasi langsung di tempat penelitian. Selain itu, peneliti juga mengadakan wawancara dengan perangkat serta pihak-pihak yang secara langsung berperan dalam aktivitas di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi di mana kegiatan penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember, yang beralamat di Jalan Srikoyo No. 1, Patrang, Krajan, Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan kode pos 68111.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian penting yang harus ada dalam suatu penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan dan memilih siapa saja yang akan dijadikan informan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian.

Purposive merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan pertimbangan khusus. Pertimbangan ini biasanya didasarkan pada anggapan bahwa orang yang dipilih memiliki pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang hal yang ingin diteliti, atau karena mereka memiliki peran penting dalam situasi atau objek sosial yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, informan atau subjek yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bapak Andika Akhmad Wijaya (Kepala Bagian Keuangan)
2. Bapak Heru P. (Pegawai Bagian Keuangan)
3. Ibu Merlita (Pegawai Yang Terlibat Langsung Senfan Penginputan Pajak)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah awal yang krusial dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Apabila peneliti tidak menguasai metode yang tepat dalam mengumpulkan data,

maka hasil data yang diperoleh berpotensi tidak memenuhi standar atau kebutuhan penelitian yang telah ditetapkan.²⁸

a. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis, terutama kemampuan dalam mengamati dan mengingat. Secara sederhana, observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek yang diteliti guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam analisis serta digunakan untuk memastikan objektivitas dan ketepatan informasi yang sebelumnya diperoleh, baik dari studi pustaka maupun dari hasil penelitian. Oleh karena itu, observasi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu dengan memusatkan perhatian pada apa yang perlu diamati, siapa yang menjadi objek pengamatan, serta informasi penting apa saja yang harus dikumpulkan.²⁹

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatif. Peneliti memilih metode ini karena tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas atau kehidupan subjek yang diteliti. Tujuan dari penggunaan teknik observasi ini adalah untuk memperoleh data terkait sistem informasi akuntansi dalam pelaporan pajak melalui aplikasi E-Bupot, tanpa mempengaruhi atau terlibat dalam proses yang sedang berlangsung.

²⁸ Sugiyono, 224

²⁹ Sugiyono. 226

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dalam penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan, biasanya dilakukan secara tatap muka, dengan bantuan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang sama untuk setiap responden. Selain itu, alternatif jawaban juga telah disusun sebelumnya, sehingga proses wawancara berlangsung lebih terarah dan konsisten.

c. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mempelajari literatur dan dokumen terkait. Teknik dokumentasi ini melibatkan pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang relevan. Studi dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan mendalam.³⁰

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengidentifikasi dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber serta catatan lapangan. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu, menjelaskan isi data, serta memilih informasi yang penting untuk

³⁰ Sugiyono.,240



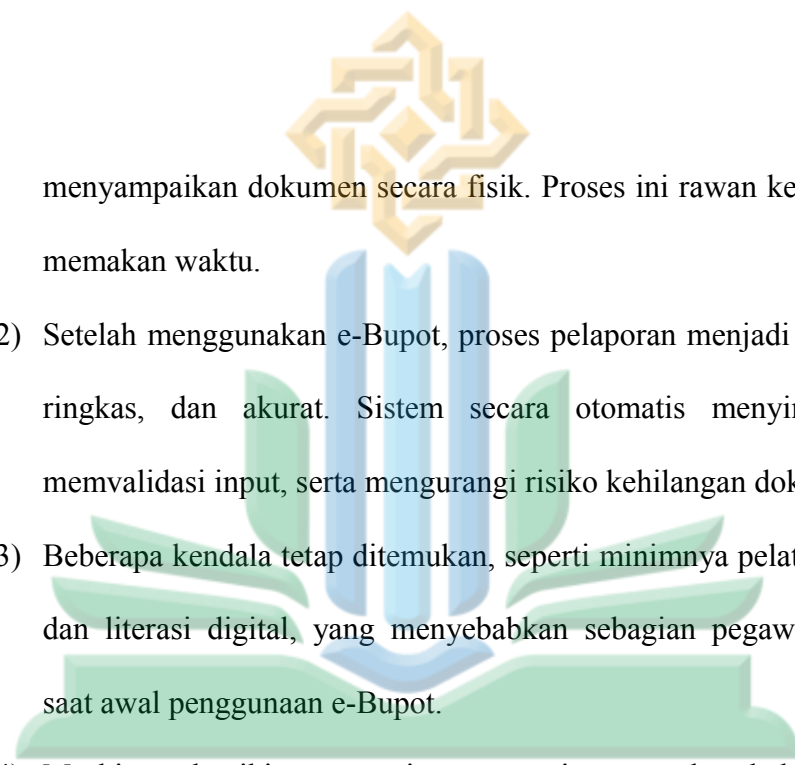
dipelajari guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data yang dilakukan secara berkelanjutan hingga data mencapai titik kejenuhan. Tahapan dalam analisis data meliputi: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*):

1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan biasanya sangat banyak, sehingga penting untuk mencatatnya secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dijelaskan, semakin lama waktu yang dihabiskan peneliti di lapangan, maka data yang terkumpul akan semakin banyak, kompleks, dan sulit diolah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis awal melalui proses reduksi data. Reduksi data merupakan langkah untuk merangkum, memilih informasi utama, dan memusatkan perhatian pada data yang dianggap penting. Dengan cara ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dalam mengelola pengumpulan data selanjutnya, serta memudahkan pencarian data jika dibutuhkan kembali.

Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih fokus pada tujuan penelitian. Dari proses ini diperoleh temuan sebagai berikut:

- 1) Sistem manual yang sebelumnya digunakan dalam pelaporan pajak menyulitkan pegawai karena harus mencetak, mengarsipkan, dan



menyampaikan dokumen secara fisik. Proses ini rawan kesalahan dan memakan waktu.

- 2) Setelah menggunakan e-Bupot, proses pelaporan menjadi lebih cepat, ringkas, dan akurat. Sistem secara otomatis menyimpan data, memvalidasi input, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen.
- 3) Beberapa kendala tetap ditemukan, seperti minimnya pelatihan formal dan literasi digital, yang menyebabkan sebagian pegawai kesulitan saat awal penggunaan e-Bupot.
- 4) Meskipun demikian, mayoritas pegawai menyatakan bahwa e-Bupot sangat membantu pekerjaan mereka dalam hal efisiensi dan keamanan data.

Hasil reduksi data menunjukkan bahwa e-Bupot memperbaiki banyak kelemahan sistem manual dan mendukung efisiensi pelaporan pajak, walau masih perlu penguatan dari sisi pelatihan dan dukungan kelembagaan.

2. Penyajian Data

Setelah data mengalami reduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan melalui deskripsi singkat atau bentuk penjelasan lainnya. Dengan penyajian data yang jelas, proses pemahaman terhadap kejadian yang diteliti menjadi lebih mudah, sehingga peneliti dapat merancang langkah kerja berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Kesimpulan

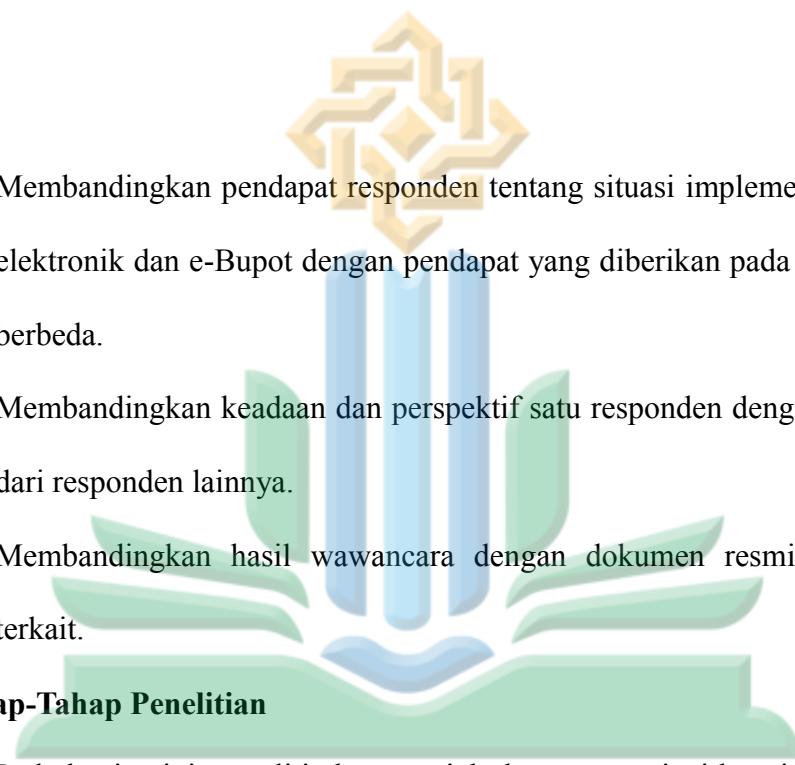
Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data tersebut kemudian dikembangkan dan dianalisis bersamaan dengan data sekunder yang mendukung penelitian. Setelah itu, hasil pengumpulan data disajikan dalam bentuk narasi teks, dan kesimpulan diambil berdasarkan data yang telah terbukti keasliannya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa e-Bupot adalah solusi efektif dalam mempermudah dan mempercepat pelaporan pajak, meskipun masih perlu ditingkatkan dari sisi SDM dan sosialisasi teknis.

F. Teknik Keabsahan Data

Keakuratan data sangat krusial untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang dikumpulkan di lapangan dengan menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi adalah metode yang mengombinasikan berbagai teknik dan sumber pengumpulan data sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih tepat dan dapat dipercaya.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan pernyataan individu secara pribadi dengan pernyataan yang disampaikan dalam diskusi atau forum resmi.

- 
3. Membandingkan pendapat responden tentang situasi implementasi sistem elektronik dan e-Bupot dengan pendapat yang diberikan pada waktu yang berbeda.
 4. Membandingkan keadaan dan perspektif satu responden dengan pendapat dari responden lainnya.
 5. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi atau arsip terkait.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan secara rinci bagaimana proses pelaksanaan penelitian akan dilakukan. Mulai dari awal hingga akhir, seluruh tahapan penelitian perlu diuraikan secara jelas. Berikut adalah langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini:

- 1) Tahapan Pra Lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Pilih lokasi penelitian dan sumber informasi
 - c. Mengurus surat-surat perizinan penelitian
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga mendatangi informan yang sudah ditentukan sebelumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Jember.

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di tingkat kabupaten serta merumuskan kebijakan pengelolaan di bidang cipta karya dan tata ruang. Selain itu, dinas ini juga menjalankan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.³¹

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pembangunan dan perijinan.
2. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program penataan ruang.
3. Pelaksanaan penataan desa dan perkotaan.
4. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman.

³¹ Struktur Organisasi et al., “PERATURAN BUPATI KUBURAYA,” 2008.

5. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebersihan maupun penerangan jalan umum.

Pemerintah Kabupaten Jember, melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai pelaksana teknis, memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya pelayanan umum dan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Dinas ini juga mendukung pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan dengan cara memberdayakan masyarakat dan mengatur tata letak perkotaan dan perdesaan, agar tercipta Jember yang tertib, bersih, indah, dan aman.

2. Visi Dan Misi Instansi

Berdasarkan dokumen rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember:

“Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.”

Visi ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai strategi pembangunan, terutama dalam mendukung misi peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur publik di seluruh wilayah Jember. Visi ini muncul sebagai bentuk kesadaran dan respons terhadap situasi kritis yang dialami Kabupaten Jember di berbagai sektor. Kabupaten Jember dianggap mengalami kemunduran, terutama karena pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingginya angka kemiskinan, serta indikator kesehatan yang belum

memadai, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting.

Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan banyak yang rusak, dan layanan publik belum memenuhi standar yang layak bagi masyarakat. Visi ini juga menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, untuk memulihkan hak-hak masyarakat atas layanan dasar dan kesejahteraan sosial.³²

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Jember mengharapkan percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi mengejar ketertinggalan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Jember secara menyeluruh.

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang	1. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang	

³² Pemerintah Kabupaten Jember, “Rencana Strategis (RENSTRA)”, 4.



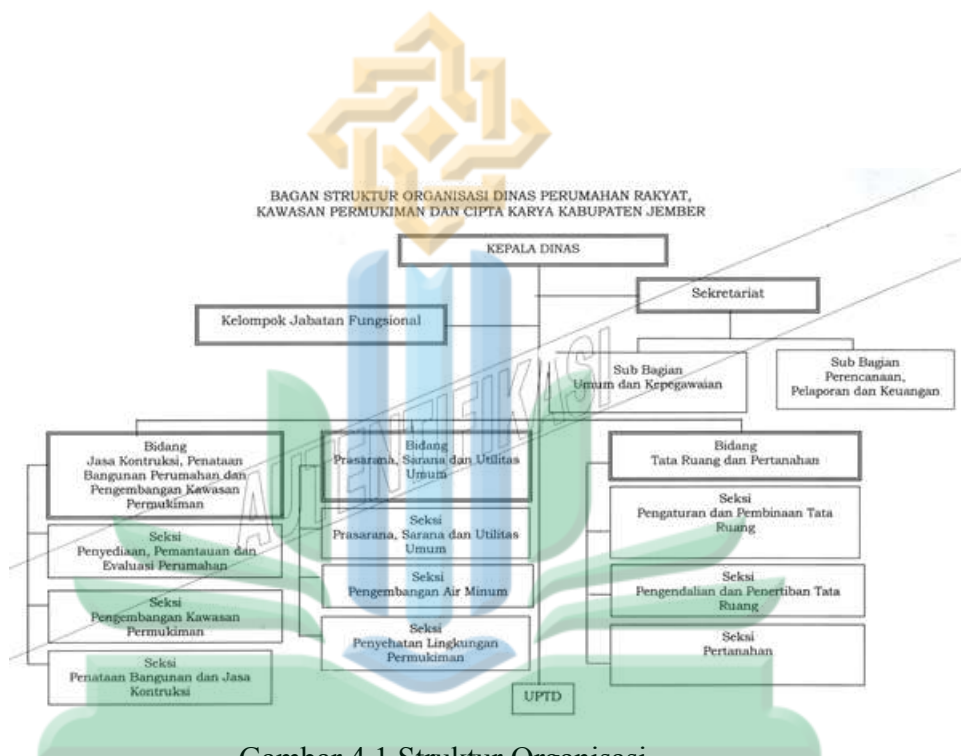
yang Berstandar Dunia	Berkualitas dan Berdaya Saing.	
Mendukung misi pembangunan Kabupaten Jember yang ke-6: <i>Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember</i>	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata

Sumber: dokumen RENSTRA 2021-2026 milik Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember

3. Struktur Organisasi Instansi Atau Perusahaan

Struktur organisasi merupakan cara sebuah perusahaan mengatur dan mengelola setiap bagian di dalamnya. Melalui struktur tersebut, kita bisa tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa, serta apa saja tugas yang harus dijalankan di setiap posisi. Hubungan antara atasan dan bawahan juga menjadi lebih jelas, sehingga pembagian tugas bisa berjalan dengan lancar.

Dengan memahami struktur tersebut, kita bisa melihat peran dan tanggung jawab masing-masing orang di dalam perusahaan secara lebih teratur. Secara garis besar, struktur organisasi membantu membagi pekerjaan, mengelompokkan tugas-tugas yang sejenis, dan memastikan semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi
(Sumber: KSOTK Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember)

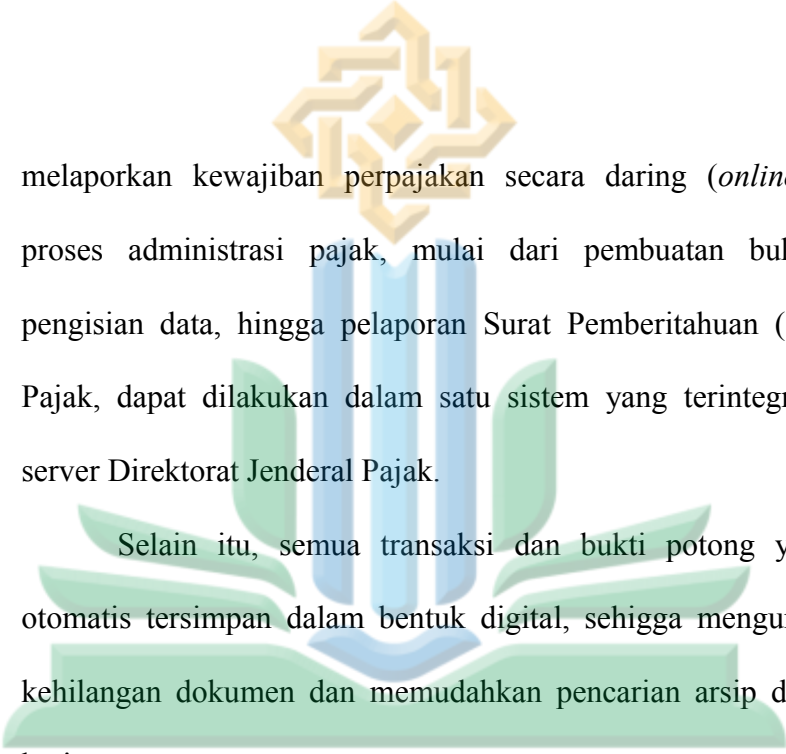
B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik Dan E-Bupot Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember

a. Sistem Elektronik pada E-bupot

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Jember menerapkan sistem elektronik dalam proses pelaporan pajaknya dengan menggunakan aplikasi E-bupot yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem ini bertujuan untuk menggantikan metode pelaporan pajak manual yang sebelumnya banyak mengandalkan pengisian dokumen fisik dan pengiriman berkas secara langsung. Dengan melalui E-bupot, pegawai dinas kini dapat membuat bukti potong pajak secara elektronik, mengelola data transaksi, serta



melaporkan kewajiban perpajakan secara daring (*online*). Seluruh proses administrasi pajak, mulai dari pembuatan bukti potong, pengisian data, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak, dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi dengan server Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, semua transaksi dan bukti potong yang dibuat otomatis tersimpan dalam bentuk digital, sehingga mengurangi risiko kehilangan dokumen dan memudahkan pencarian arsip di kemudian hari.

a) Pak Andika selaku kepala bagian keuangan, mengungkapkan

“Dengan memakai elektronik seperti e-bupot ini sangat praktis dan membantu, pekerjaan jauh lebih ringan, tidak perlu bolak-balik ngecek manual, tinggal klik-klik saja semua sudah di atur sistemnya, kalo ada salah input langsung keliatan”³³

b) Bu Merlita selaku pegawai yang terlibat langsung dengan penginputan pajak

“Adanya sistem elektronik ini membuat kami bisa kerja lebih cepat dan lebih aman, karena semua data langsung terekam di server DJP”³⁴

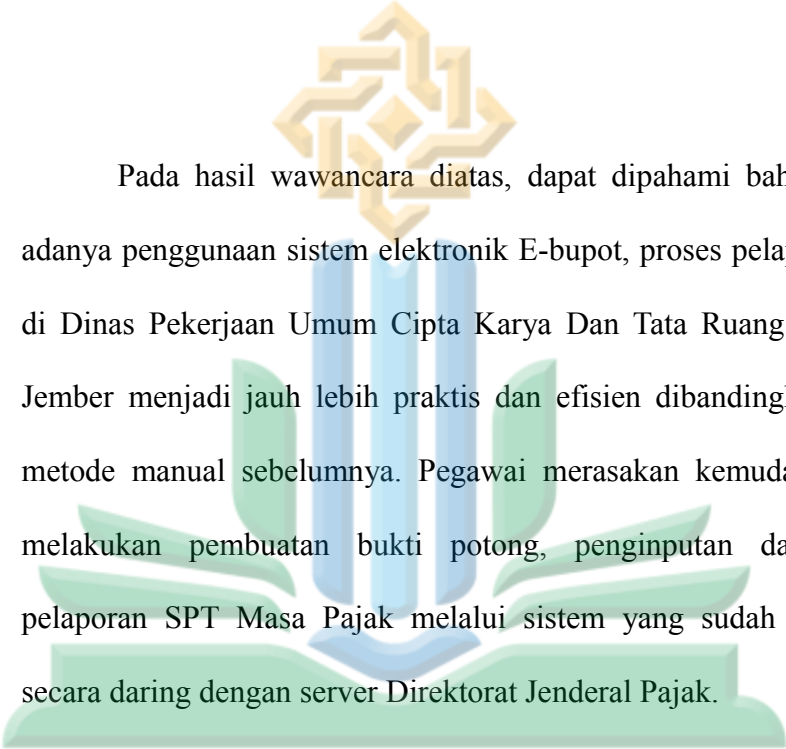
c) Pak Heru selaku karyawan bagian keuangan

“Selama ini sih sangat membantu dan berjalan lancar, dan e-bupot ini benar-benar memudahkan, tapi tetap harus ada *backup* manual sih takut kalau sewaktu-waktu sistemnya down”³⁵

³³ Andika, diwawancarai oleh Peneliti, 15 April 2025.

³⁴ Merlita, diwawancarai oleh Peneliti, 17 April 2025.

³⁵ Heru, diwawancarai oleh Peneliti, 21 April 2025.

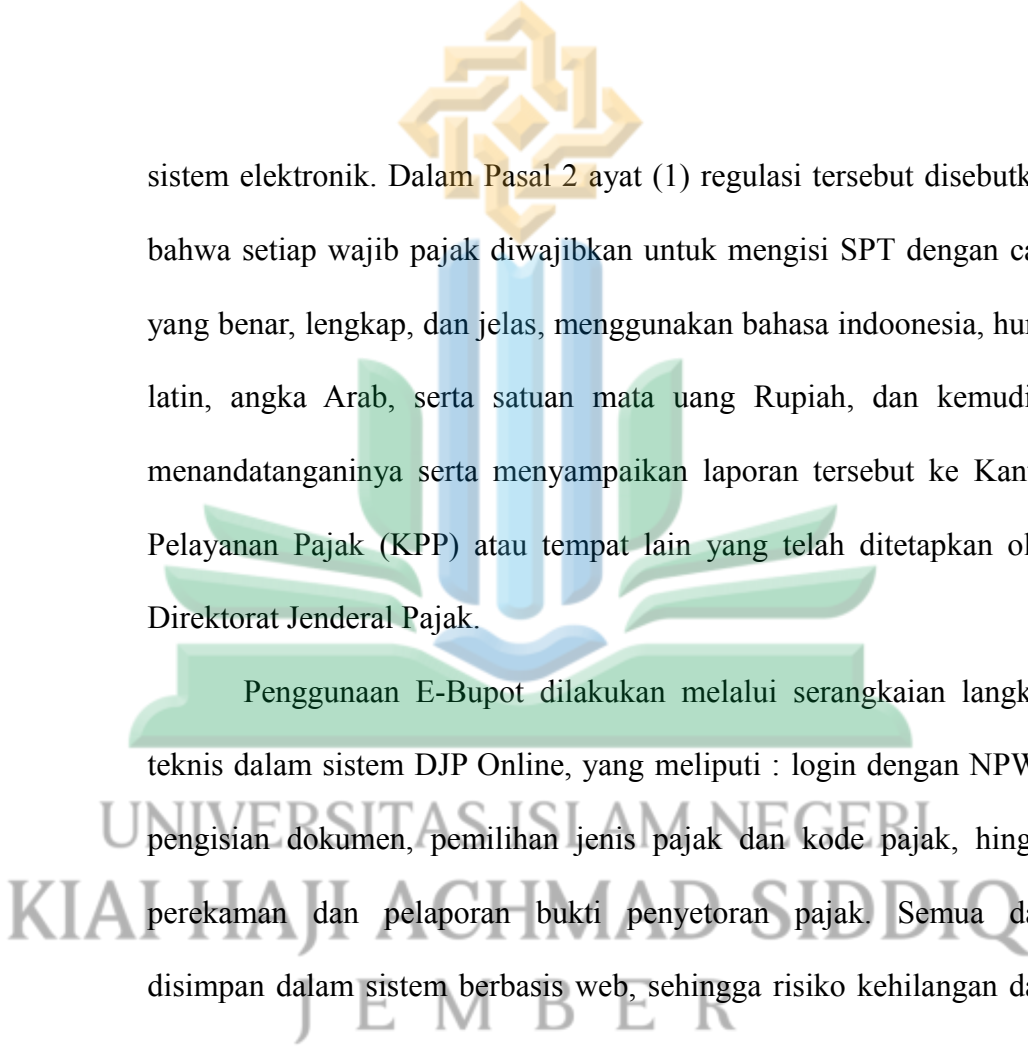


Pada hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa dengan adanya penggunaan sistem elektronik E-bupot, proses pelaporan pajak di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember menjadi jauh lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Pegawai merasakan kemudahan dalam melakukan pembuatan bukti potong, penginputan data, hingga pelaporan SPT Masa Pajak melalui sistem yang sudah terintegrasi secara daring dengan server Direktorat Jenderal Pajak.

b. Penggunaan E-Bupot

E-bupot merupakan aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan bukti pemotongan serta pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26/23 dalam format digital. Keinginan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan kini telah menjadi kebutuhan, yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem digital dalam pelaporan pajak. Salah satu inovasi tersebut adalah E-Bupot Unifikasi, sebuah sistem yang memungkinkan pembuatan dan pelaporan bukti pemotongan pajak secara elektronik. Sistem ini mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat.

Pengaturan mengenai penyampaian SPT secara elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017, yang menetapkan bahwa pelaporan dilakukan melalui



sistem elektronik. Dalam Pasal 2 ayat (1) regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPT dengan cara yang benar, lengkap, dan jelas, menggunakan bahasa indonesia, huruf latin, angka Arab, serta satuan mata uang Rupiah, dan kemudian menandatangani serta menyampaikan laporan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penggunaan E-Bupot dilakukan melalui serangkaian langkah teknis dalam sistem DJP Online, yang meliputi : login dengan NPWP, pengisian dokumen, pemilihan jenis pajak dan kode pajak, hingga perekaman dan pelaporan bukti penyetoran pajak. Semua data disimpan dalam sistem berbasis web, sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan. Selain itu, sistem ini mendukung *single reporting* untuk beberapa jejniis pajak, menjadikan proses pelaporan lebih efisien dan akurat.

2. Aplikasi E-Bupot dibanding aplikasi manual

a. Aplikasi E-Bupot

Aplikasi e-Bupot merupakan sistem digital berbasis web yang dirancang untuk menggantikan metode manual dalam pelaporan pajak terbaru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melaporkan berbagai jenis pajak (seperti PPh 21,22,23,26) dalam satu kali pengisian menggunakan fitur *single reporting*. Hal ini tidak

hanya menyederhanakan proses administrasi tetapi juga mengurangi beban kerja manual.

Keunggulan utama e-Bupot adalah adanya validasi otomatis untuk meminimalkan kesalahan data, aksesibilitas yang lebih tinggi karena berbasis digital, dan kemudahan integrasi dalam sistem lain. Selain itu, antar muka yang lebih ramah pengguna membuat aplikasi ini mudah digunakan, bahkan bagi pengguna yang tidak terlalu memahami teknologi.³⁶ Seperti yang disampaikan oleh Ibu Merlita selaku pegawai yang terlibat langsung dengan penginputan pelaporan pajak menyatakan bahwa:

“Yang pasti dengan adanya e-Bupot ini membuat kita bisa kerja lebih cepat dan tidak ribet kan aplikasi, jadi tidak mempersulit rekan-rekan dan dinas. Ketika rekan-rekan telah mengurus faktur pajak, data tersebut secara otomatis tercatat dalam aplikasi DJP Online. Sehingga, ketika saya membuka aplikasi informasi mengenai rekan-rekan yang menangani transaksi atas nama dinas sudah tertera didalam sistem.”³⁷

Selanjutnya ditambahkan oleh baak heru yang juga merupakan pegawai bagian keuangan, beliau menyampaikan bahwa :

“Dulu bisa habis waktu berjam-jam hanya untuk urus satu laporan. Sekarang paling cuma butuh waktu sebentar, asalkan jatingan stabil.jadi memang sangat membantu, kerjanya jadi lebih cepat. Kalo ada kesalahan atau kurang gitu, nanti dihubungi dari sananya kayak misal, yang ini kok datanya beda, atau datanya yg bulan ini belum masuk gitu. Artinya belum dikirim dari sininya, jadi selalu ada cross check sama

³⁶ Fatmawati Zahroh, Nur Erfina Soraya, “Implementasi E-Bupot Unifikasi Dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep,” Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol 22 (2024).

³⁷ Merlita, diwawancara oleh peneliti, 17 April 2025.

sana setiap bulannya jadi tahu kurangnya atau kesalahannya gitu cepet ketemunya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi pekporan pajak seperti DJP Online, memberikan kemudahan dalam pengolaan administrasi pajak bari dinas dan rekan-rekan. Applikasi ini tidak hanya mempermudah proses input data pajak, tetapi juga memastikan data pajak sudah tersinkronisasi dengan baik dalam sistem. Selain itu, adanya mekasisme *cross check* secara rutin antara pihak dinas dan sistem pajak memungkinkan deteksi cepat terhadap kesalahan atau kekurangan data, sehingga permasalahan dapat segera ditangani dengan efektif. Hal ini menciptakan efisiensi dan akurasi dalam proses pelaporan pajak.

Aplikasi e-Bupot Unifikasi dirancang untuk memudahkan proses pembuatan bukti pemotongan serta penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 secara digital. Pengiriman SPT secara elektronik ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Elektronik. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang Rupiah. Selain itu, SPT juga harus ditandatangani dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk melakukan input data melalui

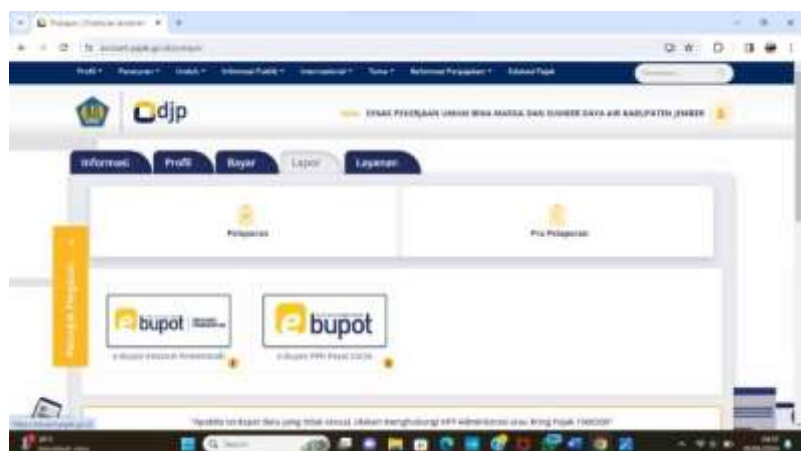
Aplikasi DJP Online, pengguna perlu memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengisian e-Bupot Unifikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Masuk/login Masuk/Login dengan menggunakan NPWP di laman DJP Online untuk mengakses e-Bupot Unifikasi. Untuk dapat menggunakannya, wajib pajak cukup login ke laman <https://djponline.pajak.go.id>



Gambar 4.2
Tampilan Login (Sumber. Website DJP Online)

- b. Pilih menu lapor, dan pilih menu “Pra Pelaporan”. Setelah itu akan muncul menu e-Bupot di sebelah kanan.



Gambar 4.3

Pra pelaporan SPT (Sumber. Website DJP Online)

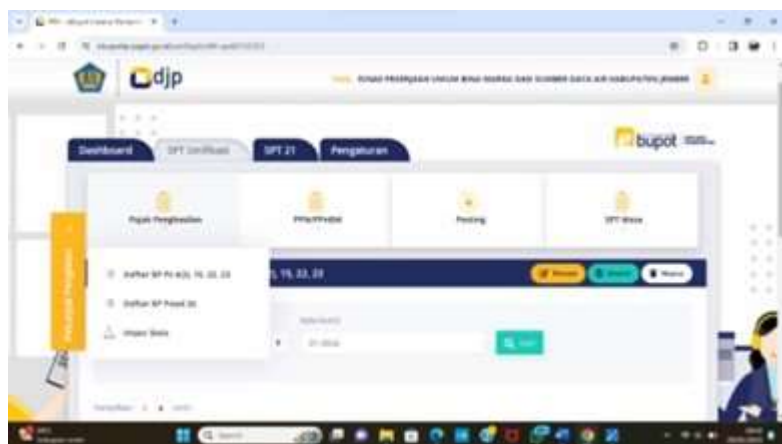
- c. Pilih menu e-Bupot, maka akan ditunjukkan ke halaman yang terdapat menu dashboard, pajak penghasilan, SPT Masa, dan Pengaturan.



Gambar. 4.4

Tampilan Menu Pra-Pelaporan (Sumber. Website DJP Online)

- d. Selanjutnya, untuk membuat bukti potong PPh, silahkan pilih menu “Pajak Penghasilan”.



Gambar 4.5

Tampilan Menu PPh (Sumber. Website DJP Online)

- e. Selanjutnya, memasukkan dokumen-dokumen yang diminta sesuai dokumen faktur pajak yang ada.



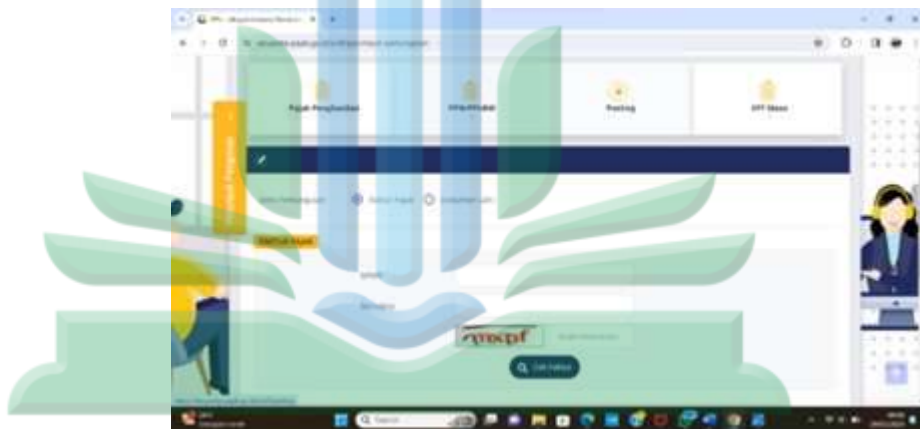
Gambar 4.6
Pengisian Dokumen (Sumber. Website DJP Online)

- f. Dapat mengisi sesuai dengan jenis pajak yang akan dibuat bukti potong nya.
- g. Jika sudah selesai dapat melakukan posting.
- h. Setelah melakukan posting, laporkan SPT Masa, lalu dapat memilih menu “perekaman bukti penyetoran” untuk PPN dan menu “penyiapan SPT Masa” untuk PPh.



Gambar 4.7
Tampilan Menu Ppn (Sumber. Website DJP Online)

- i. Selanjutnya melakukan pengisian NPWP dan No.Faktur perusahaan untuk melakukan perekaman bukti penyetoran.



Gambar 4.8
Pengisian NPWP dan NO.Faktur (Sumber. Website DJP Online)

- j. Setelah selesai melakukan pelaporan dan penyetoran, maka data yang telah dilaporkan akan muncul di menu dashboard.

Sebelum melakukan posting atas pelaporan bukti potong PPh, terlebih dahulu dilakukan pemilihan kode objek pajak yang sesuai dengan dokumen bukti potong yang tersedia. Pencocokan ini dilakukan dengan mengacu pada faktur pajak yang sebelumnya telah dihitung persentasenya oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Beberapa contoh kode objek pajak yang digunakan dalam pelaporan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 antara lain:

- 1) Kode objek pajak 28-409-22, berkaitan dengan pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan

usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk pelaku usaha perseorangan. (Tarif potong: 1,75%).

2) Kode objek pajak 22-920-01, digunakan untuk transaksi pembelian barang oleh bendaharawan APBD sebagai pemungut pajak.

3) Kode objek pajak 28-409-10, terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil.

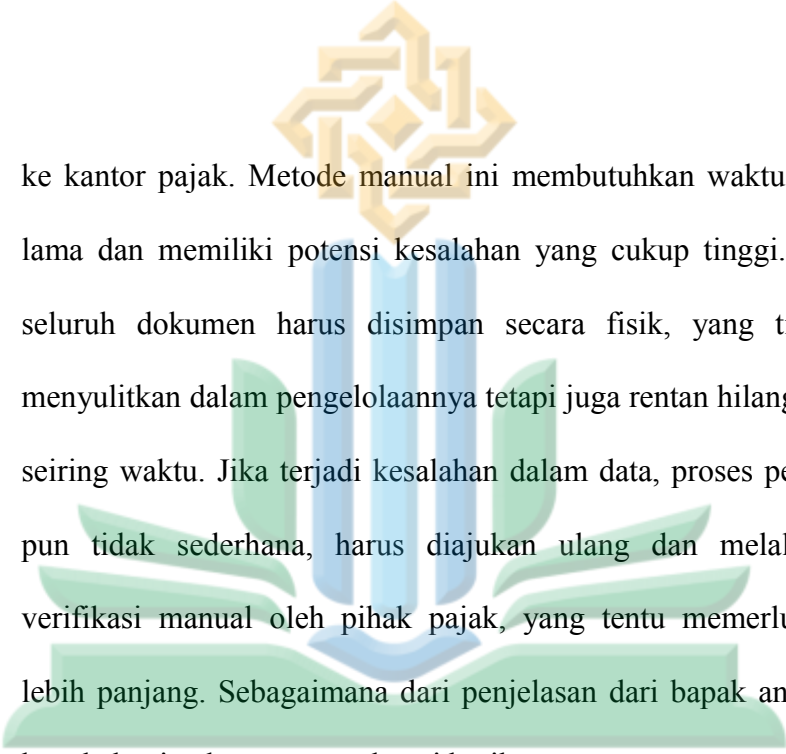
4) Kode objek pajak 28-409-27, juga untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa bersertifikat dengan kualifikasi kecil atau kompetensi individu. (Tarif potong: 3,5%).

5) Kode objek pajak 28-409-24, berkaitan dengan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan sertifikat badan usaha atau kompetensi perseorangan. (Tarif potong: 26,5%).

b. Metode Manual

Dengan e-Bupot, pelaporan dapat dilakukan tanpa harus mendatangi kantor pajak. Sistem digital ini mempersingkat waktu pelaporan, memungkinkan validasi otomatis, serta memperkuat akurasi data. Hal ini diakui oleh informan yang menyatakan bahwa sistem elektronik membuat pekerjaan lebih ringan dan mengurangi potensi keterlambatan.

Sebelum diterapkannya e-Bupot, pelaporan pajak dilakukan secara manual melalui formulir kertas dan pengiriman dokumen fisik



ke kantor pajak. Metode manual ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan memiliki potensi kesalahan yang cukup tinggi. Selain itu, seluruh dokumen harus disimpan secara fisik, yang tidak hanya menyulitkan dalam pengelolaannya tetapi juga rentan hilang atau rusak seiring waktu. Jika terjadi kesalahan dalam data, proses perbaikannya pun tidak sederhana, harus diajukan ulang dan melalui tahapan verifikasi manual oleh pihak pajak, yang tentu memerlukan waktu lebih panjang. Sebagaimana dari penjelasan dari bapak andika selaku kepala bagian keuangan, sebagai berikut:

“Kalau dulu pakai manual itu ribet, harus input sendiri, terus cetak satu-satu, simpan arsipnya juga. Kadang salah dikit, harus ulang dari awal. Sekarang pakai e-Bupot ya jauh lebih praktis, tinggal input, langsung tersimpan dan bisa di cek kapan aja”

Ibu Merlita sebagai pegawai yang terlibat langsung dengan penginputan pelaporan pajak mengungkapkan sistem manual memerlukan banyak waktu dan tenaga karena harus mencetak dokumen secara fisik dan mengantarkannya secara langsung, ia menyatakan bahwa:

“Kalau sekarang pakai e-Bupot, semua data langsung terekam otomatis di DJP. Dulu manual itu ya... ribet, kadang file-nya hilang, atau nyelip. Sekarang lebih tenang kerjanya”

Selain itu bapak heru memberikan pendapat bahwa:

“Kalau dulu manual tuh datanya sering hilang. Jadi selain prosesnya ribet, kita itu juga harus hati-hati banget, karena kalau ada dokumen yang salah atau hilang ya itu repot banget. Harus ulang lagi dari awal, dan kita nggak punya back-up. Kalau sekarang pakai aplikasi, semua data tersimpan otomatis, jadi lebih aman nggak takut hilang. Dulu juga sering ada kejadian

file yang dibawa ke kantor pajak entah ketinggalan atau nyelip, itu bikin pekerjaan mundur lagi”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik seperti e-Bupot memberikan dampak yang cukup besar terhadap pengelolaan dan pelaporan pajak. Sistem manual yang telah lama digunakan ternyata memiliki banyak kendala, mulai dari durasi pengerjaan yang cukup lama, kebutuhan tenaga yang lebih besar, hingga risiko terjadinya kesalahan dan potensi kehilangan data.

Gambar 4.8
Pelaporan Pajak Secara Manual (Sumber. Website DJP)

Dalam praktik manual, apabila terjadi kesalahan pada dokumen, maka proses harus diulang dari awal. Prosedur yang dilalui pun cukup panjang, dimulai dari pengetikan dokumen, pencetakan, pengiriman ke kantor pajak, hingga pengembalian dokumen ke instansi terkait. Hal ini menyebabkan proses kerja menjadi kurang efisien dan memakan banyak waktu.

C. Pembahasan Temuan

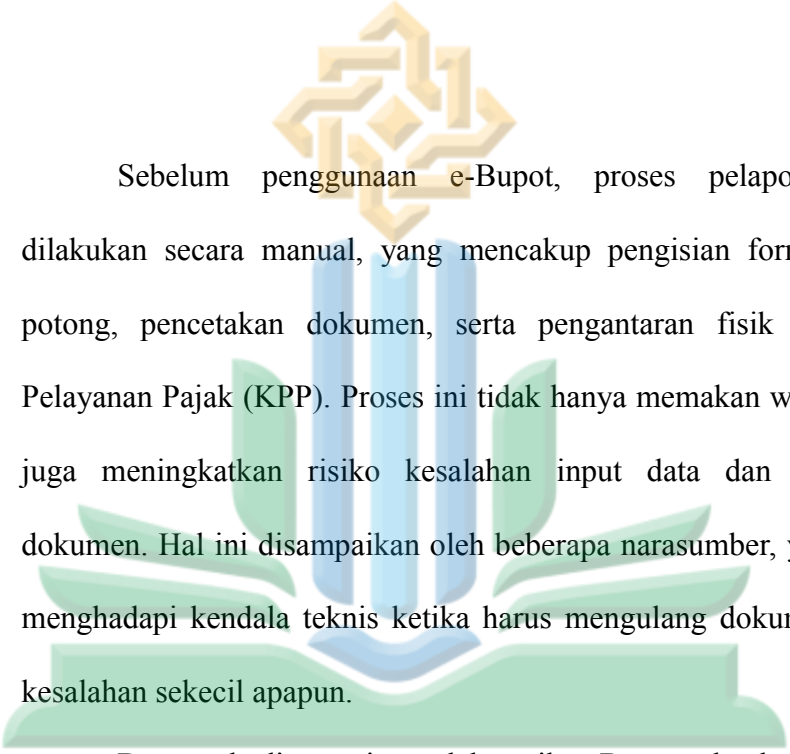
1. Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik Dan E-Bupot Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember

a. Sistem Elektronik Pada e-Bupot

Penerapan sistem elektronik dalam proses pelaporan pajak melalui aplikasi e-Bupot merupakan bentuk inovasi yang memberikan perubahan signifikan pada tata kelola administrasi perpajakan di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari dinas, diketahui bahwa sistem ini hadir menggantikan metode manual yang selama ini menjadi andalan, namun memiliki banyak keterbatasan. penggunaan sistem elektronik melalui DJP Online memungkinkan para bendahara pengeluaran di dinas tersebut untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 23 secara lebih cepat dan efisien. Melalui akun e-Bupot, proses pembuatan bukti potong, input data wajib pajak, pemilihan kode objek pajak, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dapat dilakukan secara daring dan real time. Sistem ini juga secara otomatis menghitung besaran potongan pajak berdasarkan data yang dimasukkan, sehingga meminimalisir risiko kesalahan perhitungan yang sering terjadi saat pelaporan dilakukan secara manual.

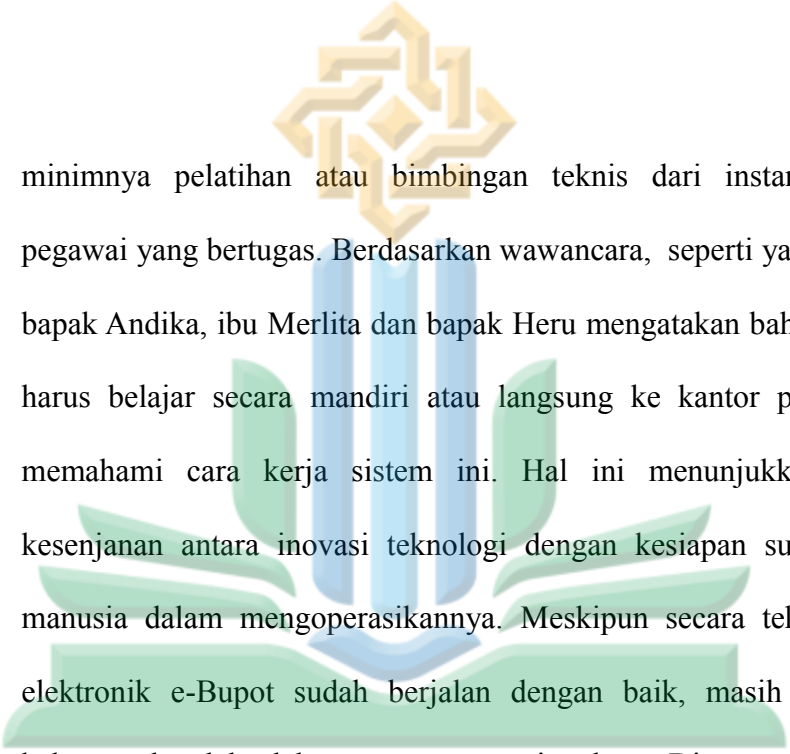
³⁸ Azizah et al., "Penggunaan Sistem Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Sebagai Bentuk Kemudahan Pelaporan Pajak Pada Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi." 69



Sebelum penggunaan e-Bupot, proses pelaporan pajak dilakukan secara manual, yang mencakup pengisian formulir bukti potong, pencetakan dokumen, serta pengantaran fisik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan input data dan kehilangan dokumen. Hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber, yang sering menghadapi kendala teknis ketika harus mengulang dokumen karena kesalahan sekecil apapun.

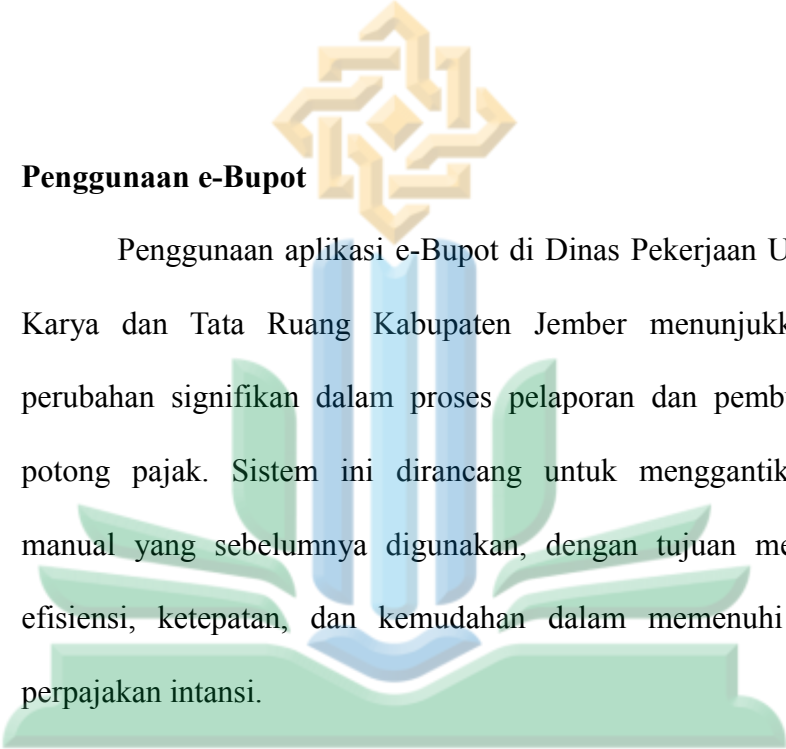
Dengan hadirnya sistem elektronik e-Bupot, alur kerja tersebut menjadi jauh lebih sederhana dan efisien. Penginputan data dilakukan langsung melalui aplikasi DJP Online, dokumen tidak lagi perlu dicetak atau diantar secara fisik, dan bukti potong pajak bisa diakses kapan saja secara digital. Aplikasi ini secara otomatis menyimpan data pemotongan dan pelaporan pajak, yang tidak hanya mengurangi risiko kesalahan, tetapi juga mempercepat proses pelaporan. Keunggulan lain yang dirasakan pengguna adalah adanya fitur *prepopulated* dan validasi otomatis, yang memberikan kepastian hukum atas data yang dilaporkan serta memudahkan pencetakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Selain itu, sistem elektronik ini terintegrasi dengan sertifikat elektronik yang hanya dapat diakses oleh pengguna resmi, sehingga mendukung aspek keamanan data dan otorisasi pengguna.

Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah



minimnya pelatihan atau bimbingan teknis dari instansi kepada pegawai yang bertugas. Berdasarkan wawancara, seperti yang dibilang bapak Andika, ibu Merlita dan bapak Heru mengatakan bahwa mereka harus belajar secara mandiri atau langsung ke kantor pajak untuk memahami cara kerja sistem ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara inovasi teknologi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya. Meskipun secara teknis sistem elektronik e-Bupot sudah berjalan dengan baik, masih ditemukan beberapa kendala dalam proses operasionalnya. Di antaranya adalah gangguan jaringan internet yang menghambat akses ke laman DJP Online, serta kurangnya pelatihan teknis yang menyebabkan sebagian bendahara masih memerlukan pendampingan saat melakukan input data secara mandiri.

Meskipun demikian, penggunaan sistem elektronik e-Bupot diakui memberikan dampak positif yang nyata terhadap efisiensi kerja dan ketepatan pelaporan pajak. Dengan proses yang lebih cepat, data yang tersimpan secara otomatis, dan kemudahan akses informasi, sistem ini memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak di lingkungan dinas. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam bidang perpajakan.



b. Penggunaan e-Bupot

Penggunaan aplikasi e-Bupot di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam proses pelaporan dan pembuatan bukti potong pajak. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan intansi.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa e-Bupot memberikan kemudahan dalam penginputan pajak rekanan, penerbitan bukti potong, penerbitan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Aplikasi ini memungkinkan staf untuk membuat bukti potong tanpa harus mencetak dan mengantarkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, karena semua proses dilakukan secara daring melalui sistem DJP Online.

Namun demikian, temuan dari implementasi e-Bupot di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember menunjukkan adanya kendala pada tahap awal penggunaan. Beberapa pegawai menyampaikan bahwa pada awal penggunaan, mereka mengalami kesulitan karena kurangnya pelatihan atau sosialisasi resmi dari pihak dinas membuat pegawai harus belajar secara mandiri atau langsung ke kantor pajak untuk memahami langkah-langkah operasional aplikasi ini. Ketiadaan pelatihan formal ini berpotensi

menimbulkan risiko kesalahan teknis dalam pengoperasian aplikasi, terutama bagi pegawai yang baru terlibat dalam tugas perpajakan.

Meskipun demikian, adanya e-Bupot mempermudah pekerjaan, selain mempercepat proses, e-Bupot juga mengurangi risiko kehilangan dokumen serta meminimalkan kesalahan pengisian data yang sebelumnya sering terjadi dalam metode manual. Selain itu, data yang sudah tersimpan di sistem lebih aman dan dapat di akses kembali apabila diperlukan. Dengan implementasi teknologi ini diharapkan pengelolaan pajak menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi modern.

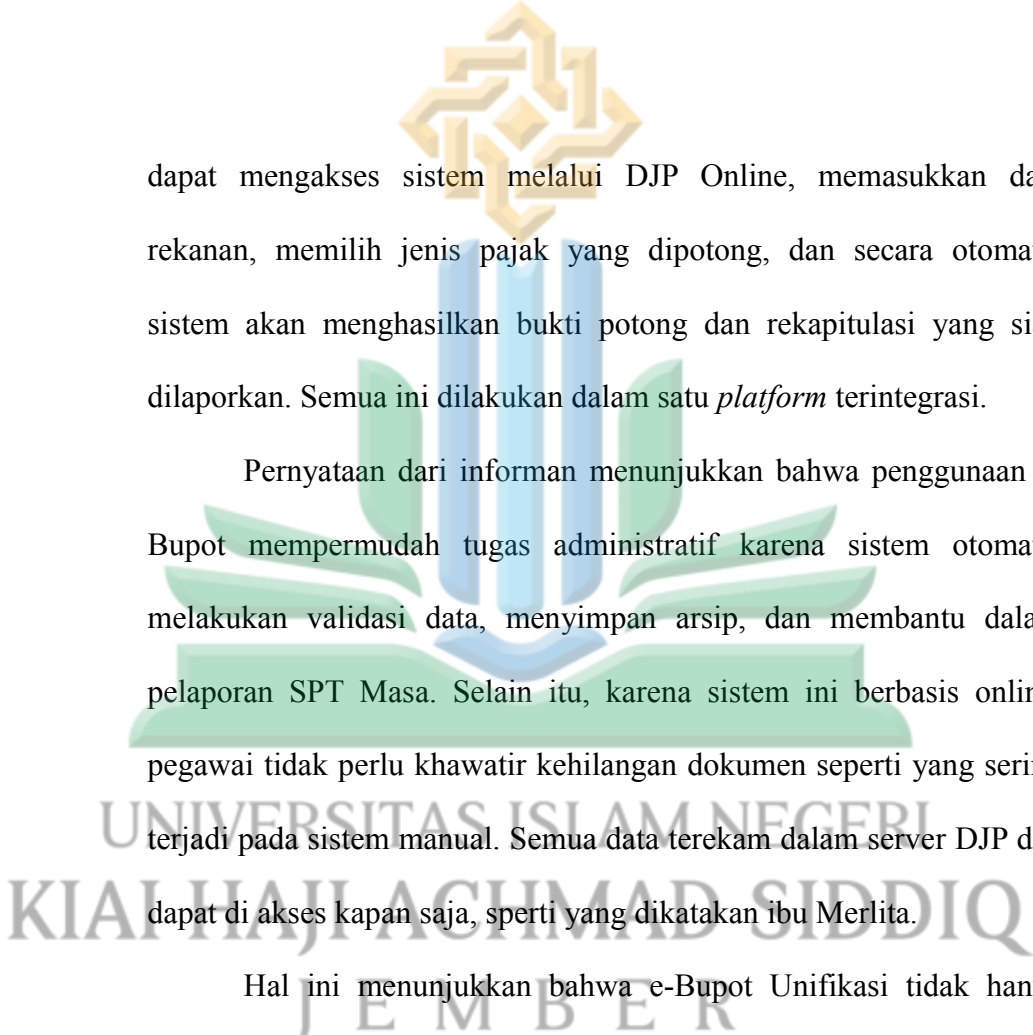
2. Aplikasi e-Bupot dibanding aplikasi manual

a. Aplikasi e-Bupot

e-Bupot merupakan aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), aplikasi ini memungkinkan pelaporan berbagai jenis pajak, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26, melalui fitur *sigle reporting*. Setiap pemotongan pajak wajib dilaporkan melalui e-Bupot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban pajak tersebut.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa e-Bupot menawarkan banyak kemudahan dibanding sistem manual. Melalui aplikasi ini, pembuatan bukti potong tidak lagi memerlukan dokumen fisik, karena seluruh data direkam secara online. Rekanan

³⁹ Mayang Putri Setyowidodo and F Fidiana, "Pengaruh Sistem Elektronik Pendaftaran , Pelaporan , Pembayaran, Dan Pemotongan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 5 (2021): 1–18, www.kemenkeu.go.id.



dapat mengakses sistem melalui DJP Online, memasukkan data rekanan, memilih jenis pajak yang dipotong, dan secara otomatis sistem akan menghasilkan bukti potong dan rekapitulasi yang siap dilaporkan. Semua ini dilakukan dalam satu *platform* terintegrasi.

Pernyataan dari informan menunjukkan bahwa penggunaan e-Bupot mempermudah tugas administratif karena sistem otomatis melakukan validasi data, menyimpan arsip, dan membantu dalam pelaporan SPT Masa. Selain itu, karena sistem ini berbasis online, pegawai tidak perlu khawatir kehilangan dokumen seperti yang sering terjadi pada sistem manual. Semua data terekam dalam server DJP dan dapat di akses kapan saja, seperti yang dikatakan ibu Merlita.

Hal ini menunjukkan bahwa e-Bupot Unifikasi tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga sebagai sistem pengawasan yang memastikan kepatuhan perpajakan secara lebih efektif. Penelitian terdahulu oleh Ni Kadek Intan Prima Putri juga mendukung temuan ini, di mana implementasi e-Bupot PPh Pasal 21 di PT. Bali General Supply mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu e-SPT. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan sistem baru, penerapan e-Bupot

membantu mengurangi risiko sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan.⁴⁰

Namun demikian, penggunaan e-Bupot juga membawa tantangan, terutama bagi pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Dalam wawancara dikatakan bahwa beberapa pegawai menyampaikan bahwa mereka sempat mengalami kebingungan saat pertama kali menggunakan aplikasi ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan formal dari dinas atau sosialisasi yang memadai. Beberapa pegawai belajar secara mandiri dengan mencari panduan atau bertanya langsung.

Pembahasan ini menggarisbawahi perbedaan yang signifikan antara metode pelaporan pajak secara manual dan penerapan sistem digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terungkap bahwa metode manual memiliki berbagai keterbatasan yang berdampak pada rendahnya efisiensi kerja. Proses pelaporan yang dilakukan secara manual, mulai dari pengisian formulir, pencetakan bukti potong, hingga pengiriman dokumen fisik ke kantor pajak, memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu, metode ini juga memiliki potensi kesalahan tinggi serta risiko kehilangan dokumen. Apabila

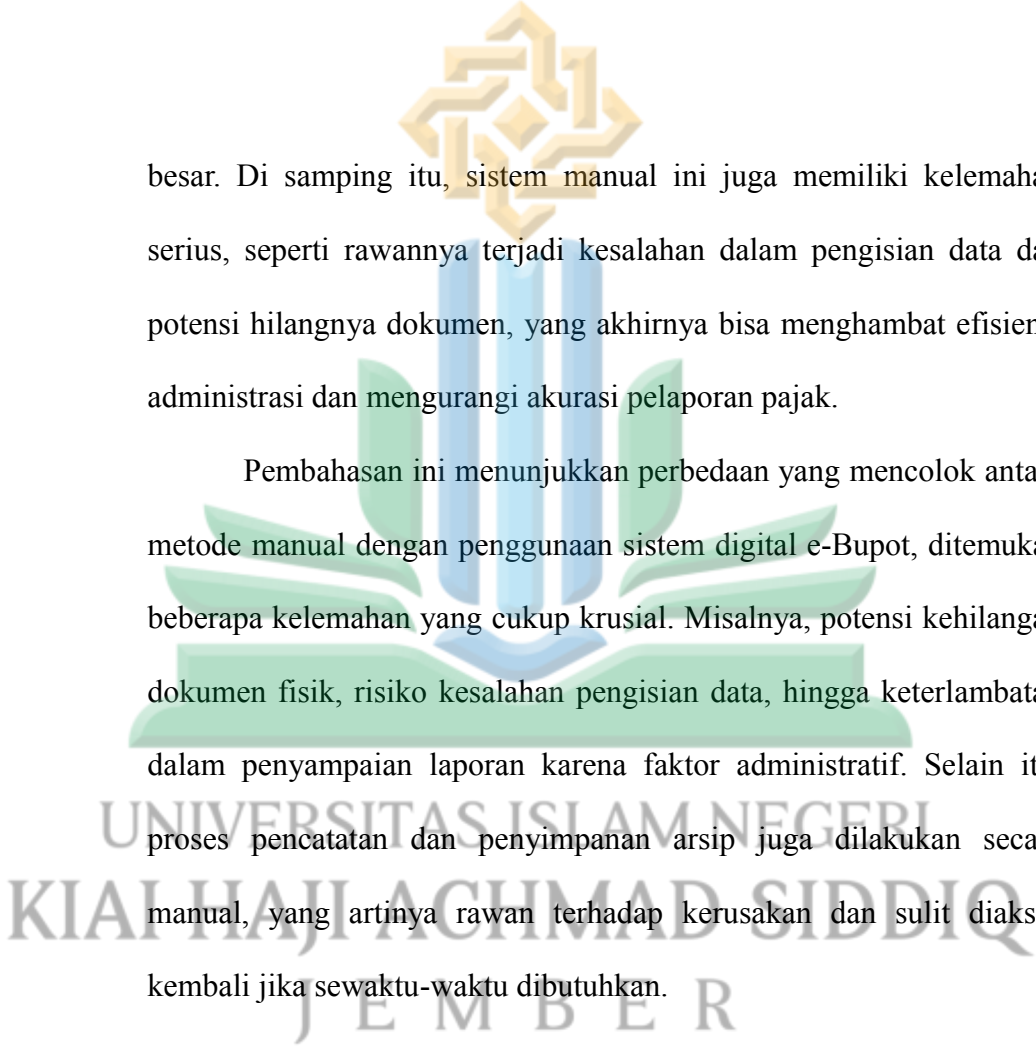
⁴⁰ Ni Kadek Intan Prima Putri, "Analisis Penerapan E-Bupot PPH 21 Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-2/PJ2024 (Studi Kasus PT. Bali General Supply)." (Skripsi. Politeknik Negeri Bali, 2024), 67.

terjadi kesalahan, proses harus diulang dari awal, yang tentu memperlambat pelaksanaan tugas administratif terkait pajak.

Sebaliknya, penggunaan sistem e-Bupot mampu menjawab berbagai kelemahan tersebut melalui fitur digital yang telah terotomatisasi. Sistem ini mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses pelaporan. Berdasarkan keterangan dari pegawai yang diwawancarai, keunggulan utama dari sistem digital ini adalah kecepatan, efisiensi, dan kemudahan dalam mengakses data. Seluruh informasi yang diinput akan langsung tersimpan dalam sistem, sehingga mengurangi kemungkinan kehilangan dan mendukung integrasi yang lebih baik dengan sistem pajak nasional. Selain itu, proses administrasi menjadi lebih praktis karena sebagian besar tahapan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diselesaikan secara digital.

b. Metode manual

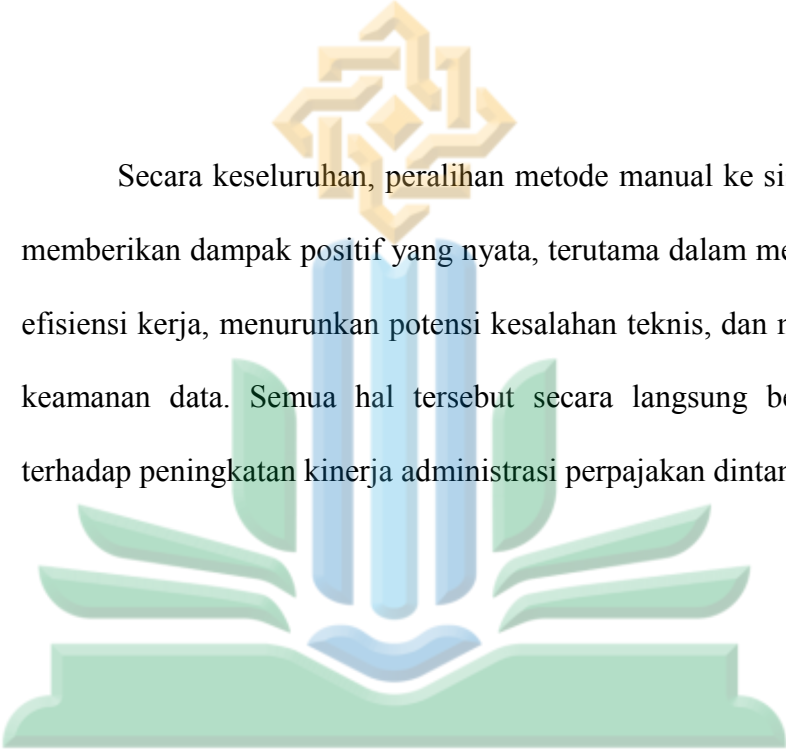
Sebelum adanya penerapan sistem digital seperti e-Bupot diterapkan, pelaporan pajak secara manual merupakan prosedur umum yang dijalankan oleh banyak instansi pemerintah. Dalam metode ini, Wajib Pajak diwajibkan mengisi formulir tertulis, mencetak bukti potong, lalu menyerahkannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seluruh proses sangat bergantung pada pekerjaan manual, sehingga memakan waktu lebih lama dan membutuhkan tenaga ekstra, khususnya dalam pengelolaan dokumen dalam jumlah



besar. Di samping itu, sistem manual ini juga memiliki kelemahan serius, seperti rawannya terjadi kesalahan dalam pengisian data dan potensi hilangnya dokumen, yang akhirnya bisa menghambat efisiensi administrasi dan mengurangi akurasi pelaporan pajak.

Pembahasan ini menunjukkan perbedaan yang mencolok antara metode manual dengan penggunaan sistem digital e-Bupot, ditemukan beberapa kelemahan yang cukup krusial. Misalnya, potensi kehilangan dokumen fisik, risiko kesalahan pengisian data, hingga keterlambatan dalam penyampaian laporan karena faktor administratif. Selain itu, proses pencatatan dan penyimpanan arsip juga dilakukan secara manual, yang artinya rawan terhadap kerusakan dan sulit diakses kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Berbeda dengan metode manual, penerapan e-Bupot berhasil mengatasi berbagai kelemahan dari metode sebelumnya dengan menghadirkan fitur otomatisasi yang mampu mengurangi *human error* serta mempercepat proses pelaporan pajak. Berdasarkan wawancara, keunggulan sistem ini terletak pada yang dimasukkan tersimpan secara otomatis, sehingga risiko kehilangan dokumen dapat diminimalisir dan koordinasi dengan pihak pajak menjadi lebih terintegrasi. Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa aplikasi ini sangat membantu dalam pengelolaan administrasi perpajakan karena memangkas banyak tahapan manual yang biasanya memakan waktu cukup lama.



Secara keseluruhan, peralihan metode manual ke sistem digital memberikan dampak positif yang nyata, terutama dalam meningkatkan efisiensi kerja, menurunkan potensi kesalahan teknis, dan memperkuat keamanan data. Semua hal tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja administrasi perpajakan dintansi terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Implementasi sistem elektronik dan e-Bupot memberikan kemudahan signifikan dalam pelaporan pajak.

Sistem ini mempercepat proses input, pengolahan, dan pengiriman laporan secara daring. E-Bupot menggantikan metode manual yang rumit, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan input, serta mempercepat pelaporan SPT Masa PPh. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh minimnya literasi digital dan kurangnya pelatihan teknis bagi pegawai.

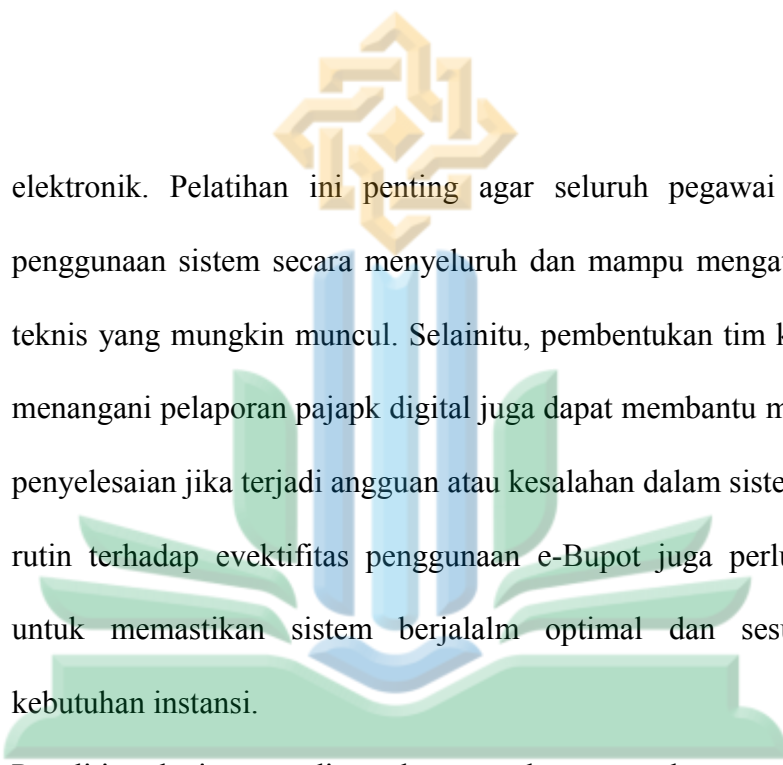
2. Aplikasi e-Bupot lebih efektif dibanding metode manual sebelumnya.

Dengan fitur validasi otomatis dan integrasi langsung ke DJP Online, e-Bupot menyederhanakan proses pelaporan, menghemat waktu, dan meningkatkan akurasi. Transisi dari metode manual ke digital juga membawa dampak positif pada pola kerja yang kini lebih modern, efisien, dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember diharapkan agar dapat menyediakan pelatihan teknis secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pelaporan pajak menggunakan sistem



elektronik. Pelatihan ini penting agar seluruh pegawai memahami penggunaan sistem secara menyeluruh dan mampu mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul. Selain itu, pembentukan tim khusus yang menangani pelaporan pajark digital juga dapat membantu mempercepat penyelesaian jika terjadi gangguan atau kesalahan dalam sistem. Evaluasi rutin terhadap efektivitas penggunaan e-Bupot juga perlu dilakukan untuk memastikan sistem berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan instansi.

2. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan implementasi e-Bupot di berbagai instansi pemerintah lainnya atau sektor swasta, sehingga hasil penelitian lebih menyeluruh dan dapat menjadi acuan perbaikan sistem ke depan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh jangka panjang penggunaan e-Bupot terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di sektor publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningrum, K. & Fatimah, H. (2024). Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban PPh 23 pada PT XYZ. Artikel SNAM, Vol. 3, Politeknik Negeri Jakarta.
- Al-Quran Kementerian Agama RI. (2015). Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Arcana, G., & Indraswarawati, S. A. P. (2023). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Bupot Unifikasi dan E-Billing terhadap Kinerja Bendaharawan dalam Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan, 4(4). <https://doi.org/10.32795/hak.v4i4.4190>
- Ariani, S. D., & Andajani, A. (2023). Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12(9). <http://www.kemenkeu.go.id>
- Arianty, F., & Desi. (2021). Analisis Penerapan Azas Ease of Administration pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot). Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 4(1). Universitas Indonesia.
- Arrahman, T. (2021). Pengaruh E-Filing, E-Tax dan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Bogor dan KPP Pratama Tangerang). Skripsi, Universitas Pakuan.
- Azizah, N., Syarifah, H., Wulandari, R. A., & lainnya. (2024). Penggunaan sistem elektronik bukti potong (e-Bupot) sebagai bentuk kemudahan pelaporan pajak pada bidang pembinaan jasa konstruksi. ADM: Jurnal Abdi, 4(1), 67–70. <https://ejournal.lapad.id/index.php/adm/article/view/534>
- Dahlan, A. M. (2021). Pajak Pratama Makassar Utara. Laporan Penelitian. KPP Pratama Makassar Utara.
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. National Conference of Accounting and Finance (NCAF), 4. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Davis, F. D., & Granić, A. (2020). The Technology Acceptance Model: 30 Years of TAM. Swiss: Springer.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-46/PJ/2015. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16755>
- Hidayat, R. A., & Sucahyati, D. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi untuk Efektivitas Administrasi Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1(4).
- Intan, R., & Wardani, N. M. S. (2024). Analisis Kepatuhan PPh Pasal 23 dan 26 Menggunakan E-Bupot Unifikasi pada PT AJC. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 5(2). Politeknik Negeri Jakarta.
- Jember, Pemerintah Kabupaten. (2021–2026). Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
- Karina, M., & Simanjuntak, B. H. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Bupot 23/26. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1).
<https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12627>
- KPPN Gorontalo. (2022). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna SAKTI pada KPPN Gorontalo. Artikel Kementerian Keuangan RI – Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gorontalo/id/data-publikasi/artikel/2920>
- Kurniawati, A. D., Maghfiroh, S., Ariyani, D. Y., & Fatimatuazzahro. (2024). Kesadaran wajib pajak ditinjau dari etika bisnis Islam pada KPP Pratama Jember. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, 2(1), 1–7. <https://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/Khidmah>
- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. (2008). Peraturan Bupati tentang Organisasi, Struktur, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.
- Puspitasari, N. (2023). Analisis Penerapan Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja BPS Kabupaten Brebes. Skripsi, Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Purba, R. B. (2023). Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Soraya, N. E., & Zahroh, F. (2024). Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22.
- Sarsiti. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- 
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisni, K. E., Mahaputra, I. N. K. A., & Dewi, L. K. S. I. (2023). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi dalam serta Pengoptimalisasian Arsip Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2.
- Wardyani, V., & Alam, S. (2022). Pengaruh Kemudahan dan Pemahaman Penggunaan Sistem E-Filing dalam Pelaporan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2).
- Wulanda, E., & Ekowati, L. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum dan Sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi pada KPP Pratama X. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 3. Politeknik Negeri Jakarta.
- Zefanya, I. (2022). *Pelaporan Pajak Penghasilan Bulanan Pasal 23 dengan e-Bupot pada PT DG*. Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Zumariz, I., & Ratnawati, D. (2024). Analisis Efektivitas DJP Online dalam Pembuatan Laporan Pajak Terpadu. *Jurnal Akuntansi Digital*, 6(2).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik dan Bukti Potong E-Bupot dalam Kemudahan Pelaporan Pajak di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember	a. Penggunaan Sistem Elektronik b. Bukti Potong E-Bupot c. Kemudahan Pelaporan Pajak	a. Efisiensi waktu b. Keakuratan penginputan c. Otomatisasi pelaporan d. <i>Single reporting</i> e. Aksesibilitas	a. Pegawai DPU b. Dokumentasi c. Website d. Jurnal	1. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 2. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Keabsahan data a. Triangulasi data sumber b. Triangulasi data teknik	a. Bagaimana implementasi sistem elektronik dan e-Bupot? b. Apakah e-Bupot lebih efektif dibanding sistem manual? c. Apa saja kendala implementasinya?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Retno Ayu Wulandari
Nim : 211105030001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik Dan Bukti Potong E-Bupot Dalam Kemudahan Pelaporan Pajak Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Jember, 26 Mei 2025
Yang bertanda tangan

Retno ayu wulandari
NIM. 211105030001



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan sistem elektronik untuk pelaporan pajak di dinas ini? Apakah terasa lebih mudah atau justru menambah beban kerja?
2. Sebelum ada sistem elektronik dan e-Bupot, bagaimana cara Anda melaporkan pajak? Apa perbedaan yang paling terasa dibandingkan dengan sekarang?
3. Seberapa besar sistem ini membantu mempercepat proses pelaporan pajak? Apakah ada bagian yang menurut Anda masih bisa diperbaiki?
4. Apa saja masalah yang sering muncul saat menggunakan e-Bupot? Misalnya, apakah pernah mengalami kesulitan akses, kesalahan sistem, atau kendala teknis lainnya?
5. Menurut Anda, apakah sistem ini membuat proses pelaporan pajak lebih transparan? Bagaimana dengan keamanan data yang Anda kelola?
6. Apakah Anda dan rekan-rekan pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan untuk menggunakan e-Bupot? Jika ya, apakah pelatihannya cukup membantu?
7. Dengan adanya e-Bupot, apakah ada perubahan dalam kepatuhan pajak di dinas ini? Apakah sistem ini membantu mengurangi kesalahan atau keterlambatan pelaporan?
8. Jika ada kesempatan untuk meningkatkan sistem ini, perubahan apa yang paling Anda harapkan agar e-Bupot lebih mudah digunakan?



DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak andika sebagai kepala bagian keuangan



Wawancara dengan ibu merlita sebagai pegawai yang terlibat langsung dengan penginputan pajak



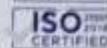
Wawancara dengan bapak heru sebagai pegawai bagian keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Retno Ayu Wulandari
NIM : 211105030001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik, Dan Bukti Potong E-Bupot, Dalam Kemudahan Pelaporan Pajak, Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Juni 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfah, MEI)
NIP. 197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

ISO
CERTIFIED

ISO
CERTIFIED

Nomor : B-570/Un.22/7.a/PP.00.9/ 04 /2025
Lampiran :
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

15 April 2025

Kepada Yth.
Kepala DPU Cipta Karya dan Tata Ruang
Jl. Srikoyo No 1 Patrang, Krajan, Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Retno Ayu Wulandari
NIM : 211105030001
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Penggunaan Sistem Elektronik, dan Bukti Potong E-Bupot, Pada Kemudahan Pelaporan Pajak, Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Jember

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu
Nurul Widyawati Islami Rahayu

BLU



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jalan Srikoyo I Nomor 1, Patrang, Jember, Jawa Timur 68111

Telepon. (0331) 425786

Laman dprkpciptakarya.jemberkab.go.id

Jember, 27 Mei 2025

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
UIN di JEMBER

Nomor : 800 / 1192 / 35.09. 313 / 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Mahasiswa

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Akhmad Siddiq Jember

Nomor : B-270/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2025 tanggal 15 April 2025 perihal sebagaimana
pokok surat dimaksud, maka bersama ini kami sampaikan mahasiswa berikut :

Nama : Retno Ayu Wulandari

Nim : 211105030001

Program Studi : Akuntansi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, dan Cipta karya Kabupaten Jember

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, dan Cipta karya
Kabupaten Jember

Ir. Rahman Anda, ST, MT, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19770524 200212 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Retno Ayu Wulandari

NIM : 211105030001

Semester : 8

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Mei 2025

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah


Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak
Nip. 198803012018012001





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KAB. JEMBER

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	15 April 2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Jember	
2	15 April 2025	Melaksanakan wawancara dengan kepala bagian keuangan	
3	17 April 2025	Melakukan wawancara dengan pegawai yang terlibat langsung dengan penginputan pajak	
4	21 April 2025	Melakukan wawancara dengan pegawai bagian keuangan	
5	27 Mei 2025	Menerima surat selesai penelitian di dinas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Jember	

Jember, 27 Mei 2025

Kepala Sub. Bagian Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya Dan Tata Ruang Kab. Jember

Andika Akhmad Wijaya, S.E
NIP. 198310142010011012



BIODATA PRIBADI



Data pribadi

Nama : Retno Ayu Wulandari
Nim : 211105030001
Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 21 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten
Lumajang
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember
No. Hp : 081805779290

Riwayat pendidikan

SDN Kedungjajang 01 (2009-2015)
MTS Miftahul Ulum Bakid (2015-2018)
MA Miftahul Ulum Bakid (2018-2021)
UIN KHAS Jember (2021-sekarang)